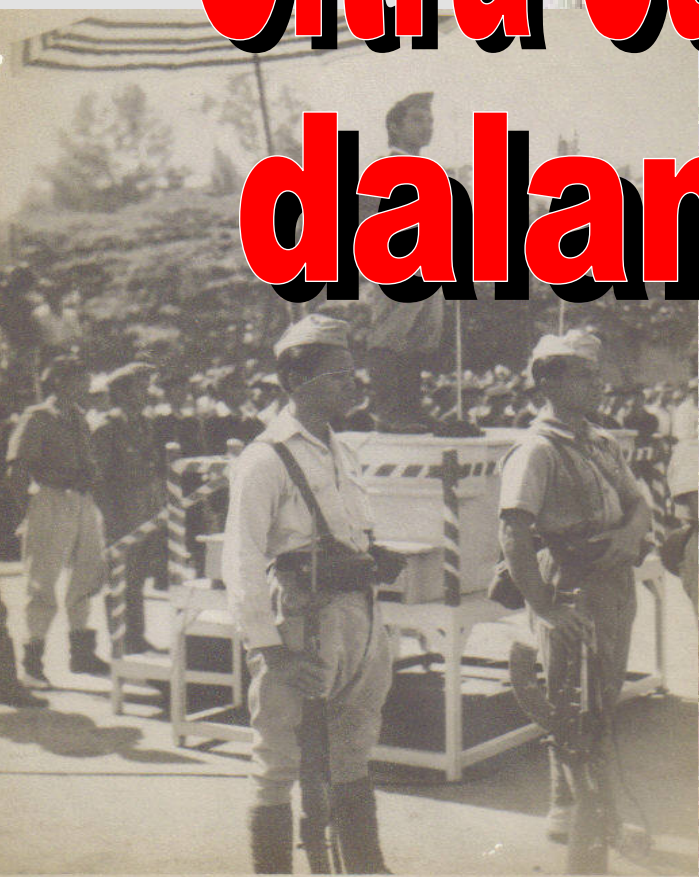


...t beher der waterloopen uitgezonderd is  
de Provincie Oost-Java.  
...an het beher uitgezonderd is  
de Provincie Oost-Java.

OVERZICHTSKAART BEHOORENDE BIJ DE ORDONNANTIE  
INSTELLING VAN DE PROVINCIE OOST-JAVA  
(ZITTINGSJAAR 1928-1929 OND. 51)  
(Drukkerij: 1928 N. 285)  
SCHAAL 1:500.000.

# Citra Jawa Timur dalam Arsip



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, NOVEMBER 2004**



## **SAMBUTAN**

### **KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Jawa Timur merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya adalah merupakan kegiatan dalam bentuk pengungkapan memori kolektif daerah dalam NKRI. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dengan mencermati informasi yang tersimpan dalam arsip akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan sebagai Bangsa Indonesia.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan

tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam program ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah yang ada melalui Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus gloJawa Timursasi. Dengan demikian harus dipahami pula bahwa semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 10 November 2004  
Kepala,

**Djoko Utomo**

# DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI .....	i
Daftar Isi .....	iii
Pendahuluan .....	1
Daftar Pustaka .....	14
Citra Jawa Timur Dalam Arsip .....	16
Geografis .....	17
Pemerintahan .....	32
Parlemen .....	51
Politik .....	57
Kunjungan Presiden .....	62
Pendidikan .....	79
Jurnalistik .....	91
Hukum .....	96
Kesenian dan Pariwisata .....	101
Transportasi .....	111
Pembangunan .....	116
Industri .....	131
Perdagangan .....	147
Sosial .....	152
Lingkungan Hidup .....	156
Pertanian dan Perkebunan .....	165
Pertahanan dan Keamanan .....	171
Daftar Arsip Jawa Timur yang Diserahkan .....	179
Penutup .....	208

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diterapkan. Undang-undang ini telah disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengamanatkan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan layanan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal. Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan dan mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Dalam pelaksanaannya, penerapan Otonomi Daerah ini tidak luput dari ekses negatif. Ekses ini berupa eforia yang berlebihan, yakni munculnya keinginan dari sekelompok masyarakat di daerah yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada gilirannya ekses ini dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

**Citra Jawa Timur Dalam Arsip** diharapkan dapat mengawali tumbuhnya gagasan kebangsaan. Melalui materi yang ditampilkan dapat membangun kesadaran anak bangsa bahwa NKRI yang kita nikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan

Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang akan diserahkan arsipnya pada Tahun 2004 ini adalah Provinsi Jawa Timur.

Arsip Jawa Timur yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu dari mulai awal abad 17 sampai dengan abad 20, yakni sejak Zaman VOC, Hindia Belanda sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang berbagai interaksi yang terjadi di Jawa Timur pada periode tersebut, yang diharapkan dapat mendorong rasa solidaritas bagi masyarakat Jawa Timur dan dapat memacu peningkatan upaya perluasan khasanah arsip statis Provinsi Jawa Timur.

### **Lingkungan Geografis dan Kependudukan**

Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa dengan luas 47.921,98 km<sup>2</sup>. Panjang wilayah Jawa Timur dari arah barat ke timur kurang lebih 400 km. Sedangkan lebar wilayah provinsi ini tidak

sama. Di bagian barat yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah, lebarnya kurang lebih 200 km, sedang dibagian tengah lebih kurang 60 km dan bagian timur kurang lebih 105 km. Jawa Timur terbagi dalam tiga kategori geologis dengan struktur yang berbeda. Di selatan terdapat daerah pegunungan, kemudian zone tengah dengan rangkaian gunung berapi dan pegunungan di utara. Selain itu dari segi relief permukaan bumi dapat dibedakan adanya dataran tinggi dan dataran rendah. Dengan kondisi yang demikian Jawa Timur juga memiliki 80 sungai yang sebagian besar mengalir ke arah utara melewati dataran rendah yang sangat luas, salah satu sungai yang terpanjang adalah Sungai Brantas. Wilayah ini juga kaya akan danau alam maupun waduk atau bendungan buatan.

Di wilayah ini berdiam suku Jawa, Madura dan Tengger, selain penduduk asli terdapat juga kaum pendatang. Sebagai daerah di mana pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara, Jawa Timur memiliki khasanah sejarah peradaban manusia tertua di dunia, antara lain seperti penemuan spesies *Homo Mojokertensis* di lembah Sungai Brantas. Pada masa kolonial, bagi bangsa Indonesia, termasuk yang ada di Jawa Timur, sistem yang ada telah menciptakan struktur masyarakat yang dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok. Pertama kelompok Eropa/Belanda sebagai lapisan paling atas dan sekaligus penguasa. Kedua, kelompok Timur Asing yang sebagian besar terdiri dari orang Tionghoa. Ketiga, kelompok pribumi walaupun jumlahnya banyak, tetapi mereka menjadi lapisan paling bawah di negerinya sendiri. Ketika Indonesia merdeka, jumlah penduduk Jawa Timur seluruhnya 18.027.303 jiwa.

## Perkembangan Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan sejarah perkembangannya, kegiatan administrasi pemerintahan daerah di Jawa Timur, baru dimulai pada awal abad ke-20.

Pada masa Hindia-Belanda, khususnya dibawah pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, pertama kalinya secara formal diadakan pembentukan karesidenan dan kabupaten di Pulau Jawa. Berdasarkan ***Staatsblad No. 16/1819***, Pulau Jawa dibagi ke dalam dua puluh wilayah karesidenan diantaranya adalah Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi dan Madura. Tetapi pembenahan wilayah administrasi pemerintahan secara agak menyeluruh baru dilakukan pada permulaan abad ke-20. Beberapa daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari Jawa Tengah, seperti Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Blora, pada tahun 1929 dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Undang-undang Desentralisasi pertama dikeluarkan pada tahun 1903, dengan maksud mendirikan berbagai dewan penasehat pada tingkat karesidenan dan kota praja. Langkah menuju desentralisasi ini ialah diundangkannya ***Locale Ordonantie*** pada tahun 1905. Walaupun desentralisasi pada masa itu dinilai tidak memuaskan, namun desentralisasi tersebut merupakan titik awal yang mematahkan sistem sentralisasi yang kuat. Karena desentralisasi dalam bentuk ***locale resorten*** tidak memuaskan dan secara politis sudah ketinggalan jaman, maka diadakan perombakan pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya ***Bestuurshervormingswet 1922***. Berdasarkan Undang-undang ini dikeluarkanlah ***Provincie***



**Ordonantie** (Ordonansi Provinsi), Jawa Barat (1925), Jawa Timur (1927) dan Jawa Tengah (1929). Selanjutnya secara struktural wilayah provinsi ini berturut-turut dibagi lagi dalam wilayah **afdeling** (Karesidenan), Kabupaten Kotamadya, Kawedan, Kecamatan dan desa. Disamping itu juga dikeluarkan Ordonansi Kabupaten (**Regentschap Ordonantie**) yang menjadi dasar pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten di ketiga provinsi di atas.

Provinsi Jawa Timur (*Provincie Oost Java*) dengan demikian terdiri dari **tujuh residentie**. *Residentie* Surabaya terbagi dalam *Regentschap* Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. *Residentie* Bojonegoro terdiri dari *Regentschap* Bojonegoro, Tuban, Lamongan. *Residentie* Madiun terdiri dari *Regentschap* Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan. *Residentie* Kediri terdiri dari *Regentschap* Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung. *Residentie* Malang terdiri dari *Regentschap* Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. *Residentie* Besuki terdiri dari *Regentschap* Bondowoso, Panarukan, Jember, Banyuwangi. *Residentie* Madura terdiri dari *Regentschap* Pamekasan, Sumenep, Bangkalan.

Masa pendudukan Jepang, Jawa Timur berada dalam koordinator pemerintahan militer daerah yang disebut **Gunseibu**. Kemudian berdasarkan Undang-Undang yang diberlakukan pada tanggal 8 Agustus 1942, Jawa Timur terbagi dalam **Syu** atau karesidenan yang berjumlah tujuh, sebagai berikut: Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Pada masa Perang Kemerdekaan Jawa Timur pernah berada dibawah pemerintahan Gubernur Militer Jawa Timur. Tanggal 4 Maret 1950 Pemerintah Pusat menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Timur dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1950. Berdasarkan Undang-

undang tersebut, wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi tujuh karesidenan, yakni Surabaya, Malang, Besuki, Kediri, Madiun, Bojonegoro dan Madura dengan 29 kabupaten.

### **Jawa Timur Sebagai Simbol Perjuangan**

Di dalam catatan sejarah Indonesia, sebelum kedatangan orang-orang Eropa/Belanda, wilayah Jawa Timur pernah menjadi pusat kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Isyana, Darmawangsa, Airlangga, Kediri, Singosari dan Majapahit. Sesudah Majapahit jatuh, sebagian wilayah Jawa Timur berturut-turut menjadi bagian wilayah Kerajaan Demak, Pajang dan Mataram. Selanjutnya ketika orang-orang Eropa/Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di wilayah Indonesia, secara berangsur-angsur sebagian wilayah Jawa Timur jatuh dan dikuasai Belanda.

Menanggapi kenyataan adanya ketidakadilan dalam kerangka sistem kolonial, di Jawa Timur banyak timbul perlawanan-perlawanan rakyat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Selama masa kolonial di Jawa Timur tercatat beberapa perlawanan seperti di daerah Sidoarjo yang dipimpin **Kyai Kasan Mukmin**, di Berbek Kediri dibawah pimpinan **K.H. Daramajaya**, di Mojokerto di bawah pimpinan **Murakat**.

Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang paling "kaya" dengan gejolak, hal ini tampaknya menunjukkan dinamisme yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dalam sejarah pertumbuhan pemerintah RI di Jawa Timur, Surabaya merupakan kota yang pertama kali mencatat riwayat sebagai pusat pemerintahan daerah yang dapat menjalankan perannya baik ke dalam maupun ke luar. Ketika pemerintah daerah RI di Surabaya

sedang mengkonsolidasikan usaha-usaha pemerintahan ke dalam, banyak persoalan dengan bala tentara Jepang yang harus diselesaikan dengan jalan perundingan, bila itu gagal maka dilakukan dengan cara yang tegas. Hal serupa juga harus dihadapi dengan wakil-wakil tentara Sekutu. Selama masa Perang Kemerdekaan perlawanan paling keras terhadap kehadiran kembali kolonialisme ditunjukkan oleh rakyat Jawa Timur. Pendaratan tentara Sekutu dan Belanda/NICA dengan maksud untuk merebut kekuasaan di kota Surabaya di tolak mentah-mentah oleh rakyat Surabaya. Keadaan inilah yang kemudian membakar pecahnya perang besar **10 Nopember 1945** di Surabaya, suatu peristiwa yang kini diperingati sebagai **Hari Pahlawan**.

### **Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya**

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur pada masa kolonial, sangat berkaitan dan tidak terlepas dengan masalah struktur masyarakat Indonesia. Pada dasarnya struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Pertama, adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang sangat tajam. Kedua, secara horizontal masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan, ini semua sering disebut sebagai ciri masyarakat majemuk. Setelah Indonesia merdeka, stratifikasi sosial masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk masyarakat Jawa Timur sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan serta keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan,

Jawa Timur memiliki struktur demografis yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang berbeda. Dan seperti umumnya di Jawa, hampir di semua wilayah dihuni penduduk dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, dengan demikian wilayah ini sejak dahulu sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Surabaya sebagai ibukota provinsi yang merupakan kota terbesar setelah Jakarta, tidak saja menjadikannya sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi tetapi juga sebagai simpul jaringan yang menghubungkan Jawa dengan wilayah Indonesia Timur. Sejak jaman kolonial Surabaya sudah berkembang menjadi kota pelabuhan yang besar sebagai tempat transit komoditas perkebunan dan hasil industri yang banyak berkembang di Jawa Timur. Selain itu di Surabaya pula terdapat pangkalan Angkatan Laut terbesar di Indonesia.

Potensi ekonomi yang dimiliki Jawa Timur berasal dari berbagai sektor. Pertanian menghasilkan padi, palawija dan sayur mayur. Hasil perkebunan terdiri dari tembakau, tebu, coklat, karet, cengkeh, kapuk, vanili, apel, jeruk dan Mangga. Hasil utama perikanan adalah udang, bandeng dan ikan laut. Sementara hasil peternakan adalah kerbau, sapi, kambing, domba dan unggas. Hasil hutan terdiri dari kayu jati, mahoni dan akasia. Di Jawa Timur juga berkembang hasil tambang batu kapur, bijih besi, gips dan mangaan. Jawa Timur juga mempunyai potensi industri yang besar seperti industri semen, petro kimia, industri rokok, farmasi, industri bahan makanan, industri bahan bangunan serta industri mesin, alat berat dan perkapalan.

Dari segi budaya, Jawa Timur memiliki beberapa budaya dan kesenian yang khas. Sebagai bekas pusat

perkembangan budaya Hindu, hingga saat ini masih menyisakan komunitas Hindu di daerah Tengger. Jawa Timur dalam sejarahnya juga adalah pusat perkembangan agama Islam, bahkan di wilayah ini telah berkembang komunitas Muslim dengan latar belakang subkultur Nahdatul Ulama, yang pengaruhnya masih sangat kuat di bidang sosial politik hingga saat ini. Di bidang kesenian Jawa Timur memiliki seni Reog Ponorogo. Sementara itu di bidang pariwisata juga memiliki obyek pariwisata yang khas, baik wisata alam maupun wisata sejarah dan budaya, antara lain seperti kawah gunung Bromo dan Tengger (upacara Kesodo), Pulau Nusa Barung, situs candi dan makam tua serta karapan sapi di Pulau Madura.

### **Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah Jawa Timur**

Tema *Geografis* mengawali penampilan materi Citra Daerah Jawa Timur. Kondisi geografis ini menggambarkan pembagian wilayah hampir semua kabupaten yang ada di Jawa Timur pada masa kolonial. Secara lebih rinci adalah dasar pembagian wilayah atau penetapan perbatasan antar kabupaten yang ditetapkan pada tahun 1887. Sumber yang digunakan adalah dari ***Staatsblad van Nederlands Indie*** maupun dari arsip ***Algemene Secretarie***. Ditampilkan juga beberapa peta seperti Surabaya, Kediri dan Madiun yang diambil dari Arsip Peta F. de Haan. Untuk melengkapi masalah geografi ini ditampilkan juga peta topografi dan rencana tata kota Madiun dan Pasuruan.

Masalah *Pemerintahan* mengisi penampilan

berikutnya. Dalam hal ini dikemukakan situasi kependudukan dari beberapa daerah residensi maupun distrik masa kolonial, daftar kepangkatan pegawai bumi putera di Kadipaten Surabaya dan laporan umum dari Residensi Kediri tahun 1842. Arsip-arsip dari periode Republik Indonesia juga mengisi tema pemerintahan ini. Arsip ini umumnya meliputi kurun waktu tahun 1950-an yang berisi tentang hal-hal pemerintahan di beberapa daerah di Jawa Timur termasuk Pulau Madura, misalnya tentang pengangkatan pejabat dan pengambilan sumpah jabatan yang diambil dari arsip foto koleksi Jawatan Penerangan.

Tema yang berjudul *Parlemen* mencoba menggambarkan perkembangan lembaga perwakilan yang ada sejak masa kolonial, seperti Dewan Kota Malang dan Dewan Propinsi Jawa Timur. Sementara dari arsip foto digambarkan situasi Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Surabaya tahun 1951.

Masalah *Politik* digambarkan dengan arsip sekitar Perang Kemerdekaan, isinya berupa kegiatan partai-partai politik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, rencana "pendirian Negara Jawa Timur", juga tanggapan terhadap Peristiwa Madiun 1948.

Tema *Kunjungan Presiden* dilukiskan melalui arsip foto yang menggambarkan kunjungan kerja Presiden Soekarno di Jawa Timur termasuk Madura dari arsip Kementerian Penerangan yang berangkat tahun 1951. Selain itu juga ada beberapa pejabat yang mengadakan kunjungan di Jawa Timur, seperti Perdana Menteri Sukiman, Menteri Penerangan Sudibyo dan Gubernur Samadikun. Ditampilkan juga kunjungan Presiden India Rajendra Prasad ke Surabaya tahun 1958.

Tema *Pendidikan* menggambarkan kegiatan kependuan di Surabaya, upacara peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1951, peresmian Balai Pendidikan Masyarakat di Blitar serta peresmian Pondok Modern Gontor di Ponorogo, semuanya berangkat tahun 1951. Ada juga arsip foto mengenai kaum wanita pada kursus pemberantasan buta huruf di Banyuwangi. Ditambahkan pula Pidato Presiden Soekarno pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Surabaya tahun 1959.

Sajian selanjutnya adalah tema *Jurnalistik* yang menggambarkan kegiatan Konferensi Perusahaan Surat Kabar di Surabaya tahun 1951 dan Konferensi Dinas Kementerian Penerangan, serta serah terima jabatan Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Timur tahun 1958.

Penyajian bersambung ke masalah *Hukum*. Pertama adalah mengenai Maklumat Jaksa Agung Mr. R. Kasman Singodimedjo tahun 1946 kepada para Gubernur dan Residen, para Jaksa dan Kepala Polisi tentang ajakan untuk membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Maklumat Pemerintah tahun 1947 tentang kedudukan Pengadilan Tinggi dan perubahan Pengaturan Perlindungan Hutan di Jawa Timur. Ditampilkan juga pamflet tentang larangan kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Belanda di Jawa Timur.

Jawa Timur terkenal sebagai daerah tujuan wisata, terutama yang bernuansa sejarah. Untuk itu tema *Kesenian dan Pariwisata* relevan untuk ditampilkan. Dari arsip foto yang berasal dari arsip *Koninklijk Instituut Voor de Tropen (KIT)* dan Djawatan Penerangan digambarkan keindahan Candi Panataran, Danau Sarangan, Pulau Nusa Barung. Sementara dari sanalah kesenian digambarkan pertunjukan

tari Serimpi, pertunjukan Wayang Orang, pertunjukan Reog Ponorogo dan juga **Karapan Sapi di Madura**.

Tema *Transportasi* diwakili dengan arsip usulan penyelesaian pekerjaan perbaikan jalan Sidoarjo-Tuban tahun 1939. Sementara dari arsip foto digambarkan jembatan gantung untuk lokomotif di hutan jati Jawa Timur, kereta ketel dan pengangkutan kayu dengan menggunakan tenaga manusia, peralatan tradisional maupun mesin.

Kegiatan *Pembangunan* digambarkan oleh arsip *Burgerlijke Openbaar Werken* (BOW) dan *Binnenlands Bestuur* tentang pembangunan waduk, stasiun pemancar radio dan perkantoran, serta stasiun kereta api. Sementara dari arsip foto bisa dilihat pembangunan waduk dan sarana irigasi, usaha perikanan dan pembangunan jembatan dan perumahan, tidak ketinggalan arsip sekitar **peletakan batu pertama Tugu Pahlawan pada 10 November 1951**.

Jawa Timur terkenal sebagai salah satu sentra industri di Indonesia. Masalah *Industri* diungkapkan lewat arsip foto mengenai serangkaian kegiatan di pabrik garam, tepung tapioka, gula. Untuk skala industri yang lebih besar ditampilkan kegiatan pabrik soda, industri Semen Gresik, industri tekstil Ratatex. Sementara itu juga acara seremonial yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti, pekan raya, pembukaan pabrik baru dan gedung Bank Perkreditan Rakyat.

Tema *Perdagangan* diwakili oleh arsip tekstual tentang berita kapal Petronela dan kapal Vlessingen dalam aktivitasnya di Pelabuhan Surabaya pada tahun 1775. Selebihnya ditampilkan arsip foto mengenai suasana lelang di Pasar Turi, kegiatan pasar pada umumnya dan suasana pusat perdagangan di Surabaya tahun 1920.

Masalah *Sosial* diwakili oleh berkas laporan



penghitungan biaya perawatan, pemakaman pegawai dan proses verbal pelanggaran yang terjadi di Sanatorium Doengoes, Madiun tahun 1941-1942. Ditampilkan pula arsip foto kompleks makam bersejarah dari Malik Ibrahim di Gresik.

Masalah *lingkungan hidup* dicoba digambarkan melalui penampilan arsip foto mengenai kawah Gunung Bromo, kunjungan Presiden Soekarno ke Gunung Kelud saat meletus tahun 1951. Kemudian suasana bencana banjir yang menimpa beberapa daerah seperti Madiun, Kediri dan Jombang pada tahun 1958. Ditampilkan juga arsip mengenai upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan bencana alam tahun 1966.

Potensi *pertanian dan perkebunan* yang dimiliki Jawa Timur digambarkan dengan arsip masa kolonial mengenai tanaman pangan dan dagangan seperti padi, kacang, kopi dan kapas, serta rencana penanaman tebu di Kediri. Sementara dari arsip foto dapat dilihat areal perkebunan karet, kopi dan rosella yang ada di Jawa Timur.

Masalah *pertahanan dan keamanan* menutup rangkaian penyajian dengan mengetengahkan situasi keamanan di daerah Surabaya, Pasuruan dan Banyuwangi tahun 1801. Ditampilkan arsip peta topografis militer mengenai batas pinggir kali Surabaya, perbaikan benteng di Pasuruan dan Banyuwangi, peta rencana perubahan muara Kali Bader, Surabaya, semuanya berangka tahun 1801. Hankam di era Republik diwakili arsip foto tentang penyerahan kapal pemburu terpedo "**Tjerk Hiddes**" dari Angkatan Laut Belanda kepada Angkatan Laut RI dan suasana pelabuhan di Perusahaan Angkutan Laut Surabaya, semuanya berangka tahun 1951.

## Daftar Pustaka

Arsip Nasional RI.

1978 *Memori Serah Jabatan, 1921-1930 Jawa Timur dan Tanah Kerajaan*. Jakarta: ANRI

Badan Arsip Propinsi Jawa Timur.

2001 *Jawa Timur Pada Masa Revolusi Kemerdekaan RI Tahun 1947-1949*. Surabaya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

1999 *Pembangunan Lima Tahun di Provinsi Jawa Timur, 1969-1988*. Jakarta.

Frederick, Williams, H.

1989 *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia, Surabaya, 1926-1945*. Jakarta: Gramedia.

Geertz, Clifford.

1973 *Penjaja dan Raja : Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota*. Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya.

Hudiyanto, Reza R.

2002 *"Stadsgemeete Madiun: Kebijakan Desentralisasi Di Masa Kolonial 1919-1940"* dalam *Sejarah: Kajian dan Pengajarannya*, Tahun Ketujuh, Nomor 1, Februari.

Hutagalung, Batara R.

2001 *Mengapa Inggris Membom Surabaya?*  
*Analisa Latar Belakang Agresi Militer Inggris.*  
Jakarta: Millenium Publisher.

Onghokham.

1977 "Pulung Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik Beberapa Aspek Politik desa di Madiun Pada Abad Ke-19". *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia Jilid VII* No. 1, Januari.

*Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie. 1916, 1941-*  
Batavia Landsdrukkerij

*Staatsblad van Nederlandsch Indie. 1819*

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

1992 *Profil Propinsi RI: Jawa Timur.* Jakarta.

# CITRA JAWA TIMUR DALAM ARSIP

# GEOGRAFIS

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

N<sup>o</sup>. 101. GRENZEN. BESOEKI. *Grenzen van de hoofdplaats Besoeki, de hoofdplaats Situbondo der afdeling Panarukan, de plaats Panarukan en de hoofdplaatsen der afdelingen Bondowoso, Djember en Banjoewangi.*

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 24 Mei 1887 n<sup>o</sup>. 2/c.

Gelezen enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende grenzen voor de hoofdplaats Besoeki, voor de hoofdplaats Situbondo der afdeling Panarukan, voor de plaats Panarukan en voor de hoofdplaatsen der afdelingen Bondowoso, Djember en Banjoewangi, allen gelegen in de residentie Besoeki.

Voor de hoofdplaats Besoeki:

*ten Noorden en Noordwesten:* de zee, van een punt aan het strand, recht Noordwaarts van den Noordoostelijken hoek der dessa *Pasisir* tot aan de monding der *Loebawangrivier*;

*ten Westen en ten Zuiden:* de linkeroever der *Loebawangrivier* tot daar, waar de rivier *Majit* in haar uitkomt; verder de linkeroever der rivier *Majit* tot aan de brug van dien naam; van dat punt de rivier *Majit* in Oostelijke richting overstekende, een denkbeeldige lijn, loopende in Zuidoostelijke richting tot het Zuidwestelijkste punt van den karrenweg van *Langkap*; verder de Zuidelijke berm van dien karrenweg tot aan het punt, waar deze een Noordelijke richting aanneemt;

*ten Oosten:* van het punt, waar de karrenweg *Langkap* een Noordelijke richting aanneemt, de Oostelijke berm van dien weg tot aan het punt, waar deze in den weg *Srang* uitkomt; verder de Zuidoostelijke berm van dien weg en de Oostelijke berm van den weg *Kramatpang* tot daar, waar deze in den weg *Pekantoran* uitkomt; voorts de Noordelijke berm van dezen weg, tot daar, waar de leiding, welke het molenvater van de fabriek „de Maas“ afvoert, onder dien weg gaat; vervolgens die leiding in Noordoostelijke richting en verder een denkbeeldige lijn in dezelfde richting tot de savahs; en eindelijk de Westelijke randen der savahs langs de Oostelijke grenzen der dessa's *Kuta-Wetan* en *Pasisir* tot aan het punt aan zee, waar de Noordergrens aanvangt.

Voor de afdelingshoofdplaats Situbondo:

*ten Noorden:* de Noordergrens der dessa's *Dawoan* en *Patokan*;

*ten Westen:* de Westergrens der dessa *Patokan*;

*ten Zuiden:* de *Sampejarrivier*;

*ten Oosten:* de Oostelijke grens der dessa *Dawoan*.

2

de plaats Panarukan:

*Noorden:* de Noordergrens der dessa *Elom* tot aan de *Sangir* en deze in Zuidwestelijke richting overstekende de linker-  
oever rivier tot aan zee;

*Westen:* de zee;

*Zuidwesten en ten Oosten:* de rechteroever van de rivier *Klatahan* te monding af tot aan den Zuidoostelijksten hoek van de dessa van daar de Oostelijke grens der dessa *Kileu* tot aan de *Sangir*; verder in Zuidoostelijke richting de linkeroever van er tot aan het punt, waar de grenslijn tusschen de dessa's en *Sabrang* aanvangt; vervolgens die grenslijn Noordwaarts tot het punt, waar zij de *Sabrangleiding* raakt; deze leiding af tot aan den Zuidoostelijken hoek der dessa *Elom*; en de Oostergrens van die dessa Noordwaarts tot aan den Noordoostelijken hoek daarvan.

Voor de afdelingshoofdplaats Bondowoso:

*Noorden:* de linkeroever der rivier *Palaedoengan*;

*Westen:* de Westelijke berm van den weg, die de Westelijke uitmaakt der kampongs *Patau-Hadji Achmad* en *Pak Soudi*; er ten Noorden en ten Zuiden denkbeeldige lijnen, gelegen in de lengte van dien Westelijken berm; ten Noorden tot den linker-  
oever rivier *Palaedoengan* en ten Zuiden tot den rechteroever der rivier *Palaedoengan*;

*Zuiden en ten Oosten:* de rechteroever der rivier *Palaedoengan* tot aan den Zuidwestelijken hoek der Arabische wijk; verder de zee en Oostelijke grenzen van die wijk tot aan de rivier *Patau*.

Voor de afdelingshoofdplaats Djember:

*Noorden:* de Noordelijke grens der dessa *Djember-lor*, van het punt, waar die grens aan de *Kali Beladoeng* een aanvang neemt tot aan de rivier *Bembang*; verder de linkeroever van die rivier tot aan den weg naar *Kreongan* en van dien weg de Noordelijke berm tot aan een afstand van 74 Rijnlandsche roeden van den punt, gelegen op een afstand van 100 Rijnlandsche roeden van den binneweg naar *Gebang*, en van daar evenwijdig aan de rivier *Tjoehil* tot aan de rivier *Tjoehil*;

*Westen:* de linkeroever van de rivier *Tjoehil* tot aan het punt, waar deze valt in de rivier *Djampo*; voorts de rechteroever der rivier tot hare uitmonding in de rivier *Beladoeng*;

*Zuiden en ten Oosten:* de rechteroever der rivier *Beladoeng* tot aan den Noordoostelijken hoek van de dessa *Djember-lor*.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.2/C tanggal  
24 Mei 1887 tentang perbatasan wilayah Besuki, Situbondo,  
Panarukan, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi.  
*Algemene Secretarie Stb No. 101*

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

N<sup>o</sup>. 147. GRENZEN. MADIOEN. *Grenzen van de hoofdplaats Madioen en van de hoofdplaatsen der afdeelingen Magetan, Ngawi, Ponorogo en Patjitan.*

*Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 15 Augustus 1887 n<sup>o</sup>. 1/c.*

Gelezen enz.:

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord:

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende grenzen voor de hoofdplaats *Madioen* en voor de hoofdplaatsen der afdeelingen *Magetan, Ngawi, Ponorogo* en *Patjitan*, allen gelegen in de residentie *Madioen*.

*Voor de hoofdplaats Madioen:*

*ten Noorden en ten Westen:* De rechteroever der *Madioen-rivier* van de uitmonding der waterleiding *Klitak* tot den Zuidwestelijken uithoek van de kampong *Nambangan-kidoel*;

*ten Zuiden:* Van den Zuidwestelijken uithoek van de kampong *Nambangan-kidoel*, de Zuidelijke rand dier kampong en van de kampong *Pandean* tot den Zuidoostelijken uithoek van laatstgenoemde kampong;

*ten Oosten:* Van den Zuidoostelijken uithoek van de kampong *Pandean*, de Oostelijke rand van die kampong en van de kampongs *Taman, Kedjeron, Kartoedjo* en *Madioen-lor*, tot het punt, waar de waterleiding *Oro-Oro Ombo* dien rand verlaat; verder die leiding, tot aan den daarin gelegen permanenten dam *Oro-Oro Ombo*; vervolgens de Oostelijke rand van het stationemplacement en van de kampong *Saekokario* en eindelijk de waterleiding *Klitak* tot hare uitmonding in de *Madioen-rivier*.

*Voor de afdeelingshoofdplaats Magetan:*

*ten Noorden:* Een rechte lijn, loopende van paal 13 op den grooten weg van *Magetan* naar *Madioen* in West-Noordwestelijke richting naar het vereenigingspunt van de kali *Kliting* met de leiding *Gembong* (aan de Noord-Westzijde van de dessa *Wringin-Anom*);

*ten Westen:* Een rechte lijn van laatstgenoemd punt in Zuid-Zuidwestelijke richting naar den driesprong, gevormd door de wegen naar de kampong *Magetan*, naar *Sadon* en naar *Teroong*; van daar een rechte lijn in ongeveer Zuidelijke richting naar het op 559 meters afstand van den viersprong *Watoe-Sirah* gelegen punt in den weg naar *Tjandi*; en eindelijk een rechte lijn van dat punt in Zuidoostelijke richting naar de brug *Djavar*;

*ten Zuiden:* Van de brug *Djavar*, een rechte lijn in Oost-Zuidoostelijke richting naar het ten Zuiden van de kampong *Kemasan*

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.1/C tanggal  
13 Agustus 1887 tentang perbatasan wilayah Madiun,  
Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.  
*Algemene Secretarie Stb No. 147*

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

N<sup>o</sup>. 166. GRENZEN. PROBOLINGGO. *Grenzen van de hoofdplaats Probolinggo en van de hoofdplaatsen der afdelingen Kraksaan en Loemadjang.*

*Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 12 September 1887 n<sup>o</sup>. 1/c.*

Gelezen enz.:

De Raad van *Nederlandsch-Indië* gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende grenzen voor de hoofdplaats *Probolinggo* en voor de hoofdplaatsen der afdelingen *Kraksaan* en *Loemadjang*, allen gelegen in de residentie *Probolinggo*.

*Voor de hoofdplaats Probolinggo:*

*ten Noordoosten en Noordwesten:*

de zee van de monding der rivier *Pantjoran* tot een punt aan het strand, recht noordwaarts gelegen van dat, waar de weg, die door de dessa's *Bremi* en *Pekalongan* naar zee voert, zich het laatst, en wel in Noordoostelijke richting ombuigt;

*ten Westen:*

eene denkbeeldige lijn, welke de beide evenbedoelde punten verenigt; voorts de weg, die van zee Zuidwaarts door de dessa's *Pekalongan* en *Bremi* loopt, tot het punt, waar die weg den grooten postweg van *Pasoeroean* naar *Besoeki* ontmoet; verder van bedoeld kruispunt, het verlengde van den eerstgenoemden weg, loopende langs het erf der controleurswoning tot het punt, waar hij zich in Zuidoostelijke richting ombuigt;

*ten Zuiden:*

de weg, die, beginnende bij het laatstbedoeld punt, in Zuidoostelijke richting loopt, tot het punt, waar hij zich Noordoostwaarts ombuigt;

*ten Oosten:*

de Noordoostelijke voortzetting van dien weg van laatstbedoeld punt tot den grooten postweg van *Pasoeroean* naar *Besoeki*; vervolgens die postweg tot het punt, waar de tweede binnenweg beoosten het Europeesche kerkhof in Noordwaartsche richting gaat; verder bedoelde binnenweg, door de dessa's *Djati* en *Mangoendjarian*, tot het punt, waar deze den binnenweg naar *Dringoe* ontmoet; voorts die binnenweg in Westelijke richting tot het kruispunt met den weg, die van den Westelijken hoek van *Passar Pantjoran* Noordwaarts loopt; verder laatstbedoelde weg in Noordelijke richting tot het punt, waar hij zich in Westelijke richting ombuigt bij den linkerzijtak van de rivier *Pantjoran*; vervolgens die zijtak in Oostelijke richting tot de hoofdriever; en eindelijk de rechteroever der rivier *Pantjoran* tot hare uitmonding in zee.

2

*Voor de afdelingshoofdplaats Kraksaan:*

de denkbeeldige lijn, aanvangende bij zeker punt aan den linkerslokan *Kraksaan-Wetan*, op een afstand van 600 Meters van den grooten postweg van *Besoeki* naar *Probolinggo* evenwijdig aan dien weg in Westelijke richting tot het denkbeeldige lijn het verlengde van den weg naar

bedoeld snijpunt een denkbeeldige lijn, die het verlengde den weg van *Kraksaan* naar *Sebaro* tot den grooten *Probolinggo* naar *Besoeki*; en vervolgens genoemde weg gelegen op 400 Meters afstand bezuiden den postweg;

denkbeeldige lijn van het laatstbedoeld punt, getrokken evenwijdig aan den grooten postweg tot het punt, waar die denkbeeldige oever van de slokan *Kraksaan-Wetan* ontmoet;

er van de slokan *Kraksaan-Wetan*;

*Voor de afdelingshoofdplaats Loemadjang:*

*ten Noordwesten:*

de weg, die van het gehucht *Sekarpoetih* der dessa *Tompog* naar het Chineseche kerkhof en door het gehucht *Modjo* naar het steenen wachthuis *Modjo*, aan den grooten *Probolinggo* voert; en voorts de linkeroever van de rivier *Pantjoran* tot het gehucht *Poelosari* der dessa *Tjitrodiwangsan*;

de en Zuidelijke rand van het genoemde gehucht *Poepunt*, waar die rand den dassaweg ontmoet, welke naar de rivier *Loemadjang* naar *Kandangan* leidt; vervolgens tot aan evenbedoelden grooten weg;

*ten en ten Zuiden:*

de weg in Oostelijke richting tot het steenen wachthuis *Modjo*; de dassaweg die van dat wachthuis door de dessa *Modjo* eerst in Zuidelijke, daarna in Oostelijke en eindelijk in Westelijke richting naar den grooten weg van *Loemadjang* voert; van daar bedoelde weg in Noordoostelijke richting tot het steenen wachthuis *Pa Oewi*; vervolgens de dassaweg, die van dat wachthuis Zuidwaarts loopt naar de brug *Ditroeanan* over de rivier *Loemadjang*; en eindelijk de rechteroever van die rivier in Oostwaartsche richting tot het punt, waar zij zich bezuiden de brug in den weg naar *Hosowilangoen* Noordwaarts ombuigt;

Surat Keputusan Guberbur Jenderal No.1/C tanggal 12 September 1887 tentang perbatasan wilayah Probolinggo, Kraksaan dan Lumajang.  
*Algemene Secretarie Stb no. 166*



STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

N<sup>o</sup>. 172. GRENZEN. SOERABAJA. *Grenzen van de hoofdplaats Soerabaja en van de hoofdplaatsen der afdelingen Sidoardjo, Modjokerto, Djombang, Grisee, Sidajoe en Lamongan.*

*Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 20 September 1887 n<sup>o</sup>. 2/c.*

Gelezen:

De Raad van *Nederlandsch-Indië* gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende grenzen voor de hoofdplaats *Soerabaja* en voor de hoofdplaatsen der afdelingen *Sidoardjo, Modjokerto, Djombang, Grisee, Sidajoe* en *Lamongan*, allen gelegen in de residentie *Soerabaja*.

*Voor de hoofdplaats Soerabaja:*

*ten Noorden:* de zee, van de monding der kali *Ondo* tot de monding der kali *Anak*;

*ten Westen:* de kali *Anak* van hare monding in zee tot hare ontmoeting met de kali *Doepak*; vervolgens deze rivier Zuidwaarts en daarna Oostwaarts tot de Westelijke grens der dessa kali *Boetoe*; verder de Westelijke grens dier dessa en de Oostelijke grens van de dessa *Simo Djawar Kwagein*; en eindelijk de oude Griseesche weg tot de *Soerabaja*-rivier;

*ten Zuiden:* de *Soerabaja*-rivier van den ouden weg naar *Grisee* tot de brug te *Wonokromo*;

*ten Oosten:* de *Soerabaja*-rivier, van de brug te *Wonokromo* tot den oorsprong van haren Oostelijken zijtak in de dessa *Goebeng*; vervolgens deze riviertak tot zijne ontmoeting met de kali *Baroe*; verder deze kali tot waar zij gesneden wordt door den spoorweg *Soerabaja—Pasoeroean*; vervolgens deze spoorweg tot zijne ontmoeting met de kali *Ondo* en eindelijk deze kali tot zee.

*Voor de afdelingshoofdplaats Sidoardjo:*

*ten Noorden:* de kali *Kemambang*, van een denkbeeldig punt, waar die kali gesneden wordt door het verlengde van den weg, loopende ten Oosten van de kampong *Ketel*, tot waar zij de spoorbaan van *Soerabaja* naar *Pasoeroean* snijdt;

*ten Westen:* de spoorbaan van *Soerabaja* naar *Pasoeroean*, van het punt, waar zij de kali *Kemambang* snijdt, tot het punt, waar zij gesneden wordt door het verlengde van den weg, loopende ten Zuiden van de kampong *Pandjoenan, Toendjoengan* en *Praban*;

*ten Zuiden:* van laatstbedoeld punt een denkbeeldige rechte lijn in het verlengde van den evenbedoelden weg en vervolgens die weg tot het punt, waar hij zich bij kampong *Plipir* Noord-Oostwaarts oombuigt;

4

gens Oostwaarts langs paal 27 den een afstand van 100 meters; bestwaarts ook weder evenwijdig aan binnenweg naar *Randobotto*; verder *Mrjoenan*, beneoorden het Europeesch

*hoofdplaats Lamongan:*

de Noordelijke grenzen van de kampong *oenagan*; de Westelijke grenzen van kampong en van de kampong *karang* van *Bandaran* en de Noordelijke *Grojoek*;

grenzen van *Grojoek* en *Ranggoe*;

de Zuidelijke grenzen van *Ranggoe*, Westelijke en Zuidelijke grenzen van n de Zuidelijke grens van *Telaga-*

en van *Telaga-Anjar, Djelis, Karang-* jke grenzen van *Banjar-Anjar* en en *Dapoer*.

nantie van den Gouverneur-Generaal van *Nederlandsch-Indië*:

*De Algemeene Secretaris,*

GALLOIS.

en September 1887.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 2/C tanggal  
20 September 1887 tentang perbatasan wilayah  
Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Sidayu  
dan Lamongan.

Algemene Secretarie Stb No. 172

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

N<sup>o</sup>. 187. GRENZEN. KEDIRI. *Grenzen van de hoofdplaats Kediri en van de hoofdplaats der afdeeling Blitar.*

*Bestuit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 17 October 1887 n<sup>o</sup>. 2/c.*

Gelezen enz;

De Raad van *Nederlandsch-Indië* gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Vast te stellen de volgende grenzen voor de hoofdplaats *Kediri* en voor de hoofdplaats der afdeeling *Blitar*, residentie *Kediri*:

Voor de hoofdplaats *Kediri*:

*ten Noorden*: de kali *Balowerti* van haren oorsprong uit de *Soemberkoewah* tot den kampongweg van *Donajan*; verder deze weg tot het kruispunt met den *Taramanweg*; vervolgens de *Taramanweg* tot aan het ontmoetingspunt met den grooten postweg naar *Soerabaja*; voorts van dat punt een denkbeeldige lijn in Westelijke richting tot den linkeroever der *Brantas*-rivier en deze oever in Noordelijke richting tot waar genoemde rivier de kali *Madjenang* in zich opneemt; verder laatstgenoemde kali tot den grooten weg van *Kediri* naar *Ngandjoek*; en eindelijk deze weg tot het kruispunt met den kampongweg door de dessa *Madjenang-koelon*;

*ten Westen*: van laatstgenoemd punt de kampongweg, loopende door de dessa's *Madjenang-koelon*, *Madjenang-wetan*, *Bandar-tengah* en *Bandar-lor* tot het kruispunt met den kampongweg naar de dessa *Lirbojo*;

*ten Zuiden en Zuidwesten*: van laatstgenoemd punt de kampongweg door de dessa *Bandar-lor* tot het punt, waar hij doodloopt; vervolgens een denkbeeldige lijn in het verlengde van genoemden kampongweg tot den rechteroever der *Brantas*-rivier; en verder die oever tot aan den mond der kali *Parong*; vervolgens deze rivier tot den spoorweg; voorts de spoorweg tot de *Dalemstraat* en eindelijk die straat tot de *Tirtostraat*;

*ten Oosten*: de *Tirtostraat* van haar kruispunt met de *Dalemstraat* tot de kali *Balowerti*.

Voor de afdeelingshoofdplaats *Blitar*:

*ten Noorden en ten Westen*: een denkbeeldige lijn, loopende in Noordwestelijke richting van het ontmoetingspunt der *Gebangstraat* met de *Oost-Sanan-Wetanstraat* naar het ontmoetingspunt der *West-Sanan-Wetanstraat* met den grooten weg naar *Wlingi*; van hier een denkbeeldige lijn loopende in Zuidwestelijke richting tot het punt, waar de kali *Lahar* den weg van *Blitar* naar *Berni* snijdt; van dat snijpunt de kali *Lahar* tot de brug van *Pakoenden*; verder in Oostelijke richting de groote weg naar *Kediri*, tot den kampongweg van *Soekoredjo* naar *Tloempoe* en eindelijk deze kampongweg, tot het ontmoetingspunt met den kampongweg, die de Zuidgrens van de dessa *Toeri* vormt;

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 2/C tanggal  
17 Oktober 1887 tentang perbatasan wilayah Kediri dan  
Blitar.

*Algemene Secretarie Stb No. 187*

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

N<sup>o</sup>. 194. GRENZEN. PASOEROEAN. *Grenzen van de hoofdplaats Pasoeroean en van de hoofdplaatsen der afdeelingen Bangil en Malang.*

*Bestluit van*

Gelezen enz

De Raad van

Is goedgevo

Vast te stel  
en voor de  
gelegen in de

*ten Noordoosten*  
der kali *Tapak*  
*Patian*;

*ten Westen*  
*Gading Patian*  
verder die weg  
bij de leiding,  
zuidwaarts, tot  
naar *Kraton* k

*ten Zuiden*:  
met den grooten  
der *Kotta*; v  
aan het ontmoet  
genoemde kar  
de noordelijke  
snijpunt met

*ten Oosten*:  
den zuidelijke  
de zuidelijke  
postweg naar  
oostwaarts de  
bewesten deze  
de kali *Tapak*

N<sup>o</sup> 194

2

Voor de afdeelingshoofdplaats *Bangil*:

*ten Noorden*: van het voetpunt der denkbeeldige loodlijn, uit het snijpunt der bij de *desa Segok* samenkomende karrenwegen op den karrenweg *Yosowilangoen—Kalanganjar*, die loodlijn tot aan bovenbedoeld snijpunt en van daar in noordwestelijke richting de karrenweg *Segok—Glanggang* tot de steenen brug bij de *desa Glanggang*;

*ten Westen*: Van genoemde brug de zich in zuidwestelijke richting voortzettende karrenweg *Segok—Glanggang*, tot waar deze den weg naar *Kedoengboto* ontmoet; vervolgens in zuidelijke richting de karrenweg tot den rand van de *desa Singopolo*; voorts een denkbeeldige lijn over de sawahvelden in zuidwestelijke richting getrokken naar den noordoostelijken hoek van den klappertuin genaamd *Soekowilangoen*; verder de oostgrens van dien tuin tot den grooten postweg naar *Serabaja* en van daar eene in dezelfde richting getrokken denkbeeldige lijn tot aan den zuidelijken grens van de spoorbaan;

*ten Zuiden*: de zuidelijke grens van de spoorbaan, van het stations-emplacement en vervolgens weder van de spoorbaan tot den overweg bij *Loempangbolong*;

*ten Oosten*: van laatstbedoelden overweg in noordelijke richting de karrenweg naar *Orohombu* tot den grooten weg naar *Pasoeroean*; vervolgens in oostelijke richting die weg tot den karrenweg *Josowilangoen—Kalanganjar* en eindelijk deze weg tot het uitgangspunt van de noordelijke grenslijn.

Voor de afdeelingshoofdplaats *Malang*:

*ten Noordoosten en Noorden*: de noordelijke grens van het militair kampement van grenspaal II tot paal I; verder de noordelijke weg naar het kampement in noordelijke richting tot den weg naar *Pasoeroean*; vervolgens die weg in zuidwestelijke richting tot de *Boenoel*-leiding; verder die leiding tot de *Tembalangan*-leiding en deze laatste in noordwestelijke richting tot het punt, gelegen recht oostwaarts van de brug *Betek*, aangegeven door een steenen pilaar; en eindelijk eene denkbeeldige lijn van gemelde pilaar tot de brug *Betek*;

*ten Westen*: van de brug *Betek*, de weg naar *Batoe* tot de triangulatiepilaar *Ledok*; van daar recht westwaarts een denkbeeldige lijn tot een zeker punt aan de kali *Soekoen*, aangegeven door een steenen pilaar, verder zuidwaarts die kali tot de brug in den weg naar *Kepandjen*;

*ten Zuiden*: van evenbedoelde brug in zuidoostelijke richting een voetpad tot de zuidelijke grens van de Inlandsche begraafplaats te *Kasin*; verder deze grens tot den sawahrand; vervolgens die rand eerst noordoostwaarts en verder hoofdzakelijk zuidoostwaarts tot den

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 2/C tanggal  
27 Oktober 1887 tentang perbatasan wilayah Pasuruan,  
Bangil dan Malang.

*Algemene Secretarie Stb No. 194*



*Sketsa daerah Residensi Surabaya.  
F. de Haan No. E29*



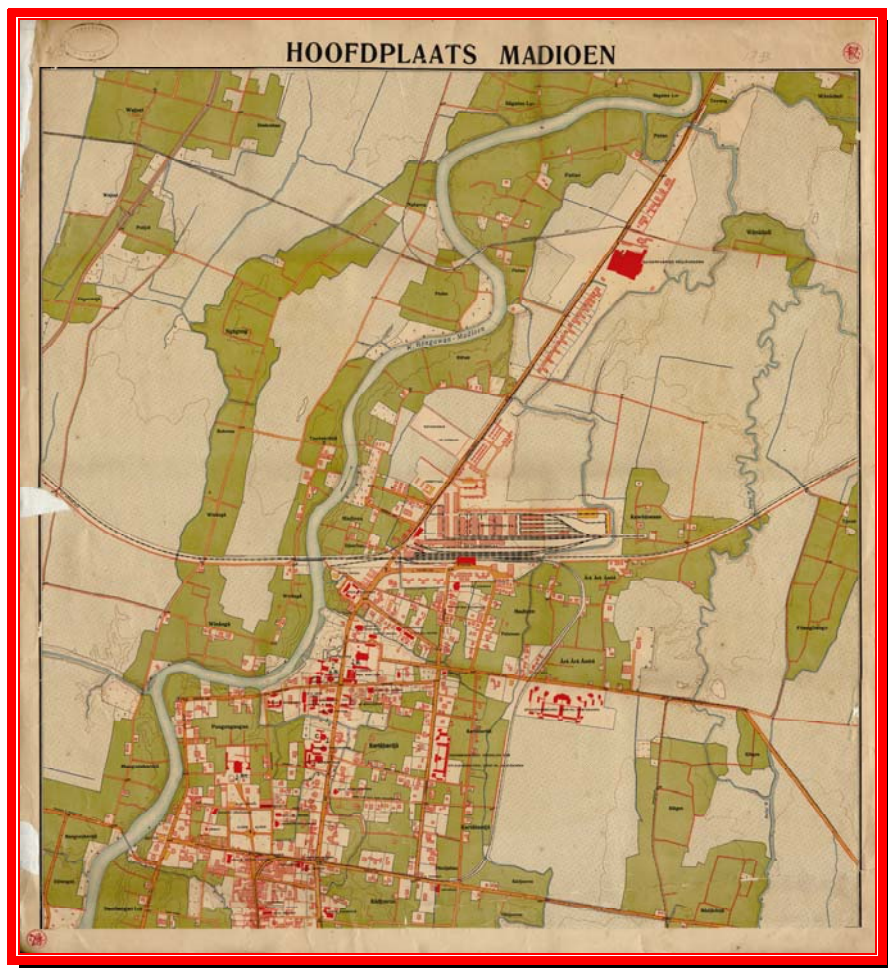
Peta wilayah Residensi Kediri. 1840  
*F.de Haan No.G47*



Peta wilayah Gresik. Tanpa Tahun  
*F. de Haan No. F50*

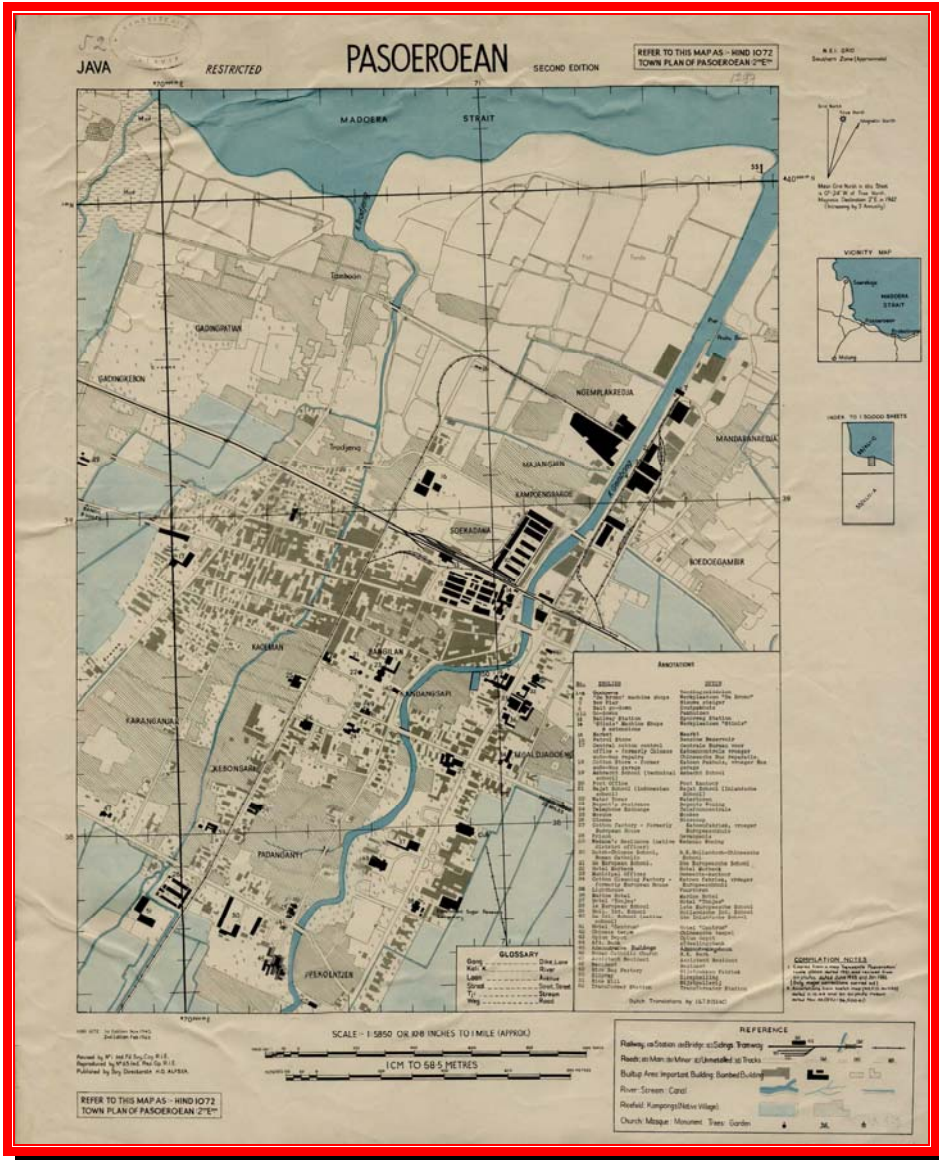


Peta wilayah Surabaya sekitar tahun 1811 – 1816.  
*F.de Haan No.K50*

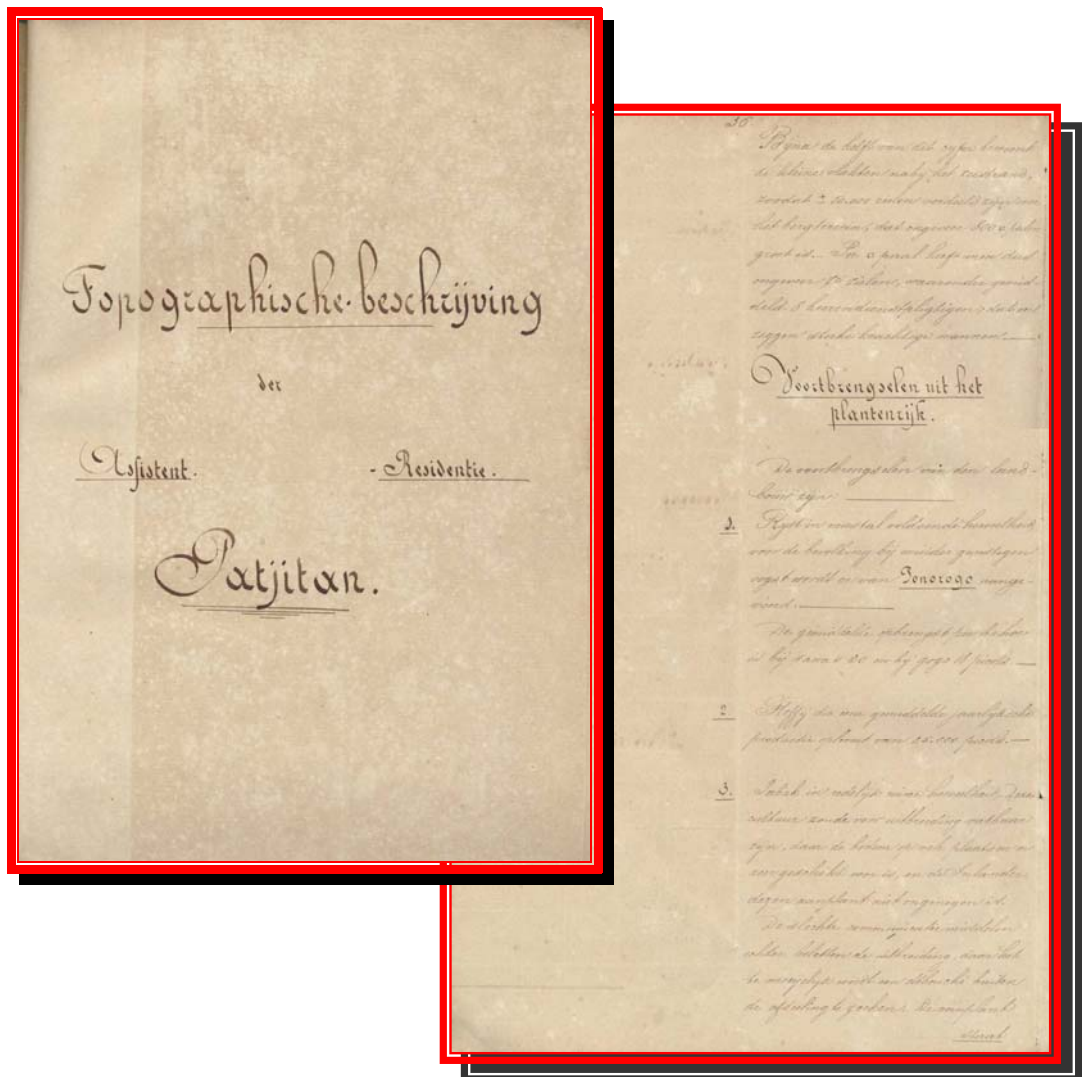


Peta Topografi Ibu Kota Madiun, Scala 1 : 5000, 1917  
*Koleksi Peta Topografi No. 1293*



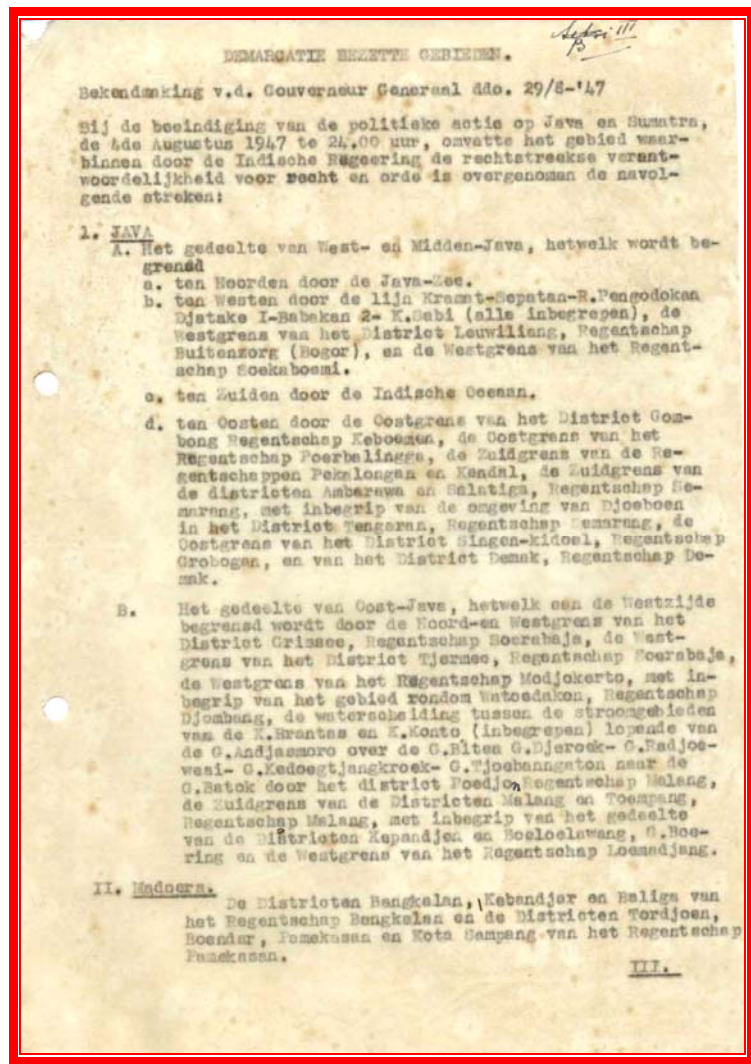


Rencana Kota Pasuruan, Februari 1946  
*Koleksi Town Plan No. 1297*



Uraian topografis tentang Residensi Pacitan yang ditulis oleh Asisten Residen Pacitan, disertai dengan batas-batas wilayah dan jumlah penduduk. 1845 – 1846

*Madiun 6*



Pengumuman Gubernur Jendral tanggal 29 Agustus 1947  
tentang batas demarkasi daerah Jawa, Madura, Sumatra,  
bahasa Belanda.

*Delegasi Indonesia/81*

# PEMERINTAHAN

*Abstract Settlement of the District of Probolinggo*

Deposits	Dava				Segel				Paddy		Sungai		Pegunt			
									Pegunt		Dava		Segel			
	R.	S.	L.	A.	R.	S.	L.	A.	S.	A.	R.	S.	R.	S.	L.	A.
Kirungaran	1	1			20	1			5		5					02 22
Kirungarajan	61	2							246		246					
Kirungasale	32	2			6				240 29		032					24 10
Kirungagan	23				90				61 7		96 12					320
Kacabangan	24	1							97		97					
Boamni	9	2							32		32					
Jaller																12
Kirungarajan	6	2			2	2			26		26					10
Boombongan	39	2	1	3	66				165 24		154 10 5					350 1 5
Potompan	26	2			11				74 25		106					54 20 5
Suka	15	2			14				84 7		73					70 22 5
Kirungatan	39	3	2	2	2	3			123 5		161 15 5					15 18
Madibogo	27			2					124		108 1 5					
Ganting	20	3			62		1		20 32		83					313 7
Panti	67		3						331 30		268					
Karangbon	37	3			16				101		101					79 15 5
Pusan	3	2			16				14		14					69 16
Kirungager	31		2		8	2	2	2	254 22		204 15					43 3 5
Kalabamans	24	2							122 45		98					
Pulagan	16								70 20							17
Tanjung	16	2							72 30		66					
Kirungbayan	44		2		9	2			179 28		180 13					47 12
Boerden	23		3		6		1		69		92					38 7
Boamni	2	2	7		21				34		34					136
Kirungasale	9	2							30 20		36					
Cita gadah	23	2			37	2	1		74 40		94					220
Kirungup					2											12
Pruduputer	38	2			10				120 9		152 12					52
Pajurangan	31	2			106	3			94 35		126					682 6
Pulagan	23	1	3						158 3		93 18					
Palahuisig	25	2			22	2			98 38		100 11					06 18
Paglangun	13	2			63	2	5		73 32		74 12 5					254 12
Padigantun					11	2										46
Lamar					20											77
Carried forward	558	3	2	3	626	2	0	3	2578	36	3256	17	3	1539	5	

Daftar penduduk pada Distrik Probolinggo berdasarkan desa dan distrik pada tahun 1812.

*Besoeki 11 / 1*

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

1928 No. 295. BESTUURSHERVORMING. DECENTRALISATIE.  
PROVINCIEËN. OOST-JAVA. Instelling van de  
provincie Oost-Java.

**IN NAAM DER KONINGIN!**

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN  
NEDERLANDSCH-INDIË,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!  
doet te weten:

Dat Hij, willende overgaan tot de instelling van een provincie  
Oost-Java;  
Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord en in overeenstem-  
ming met den Volksraad;  
Heeft goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I.

Algemeene bepalingen.

Artikel 1.

1. Het gewest Oost-Java is een provincie.
2. Artikel 2 van de ordonnatie van 19 December 1927 (Staats-  
blad No. 558) wordt buitenwerking gesteld.

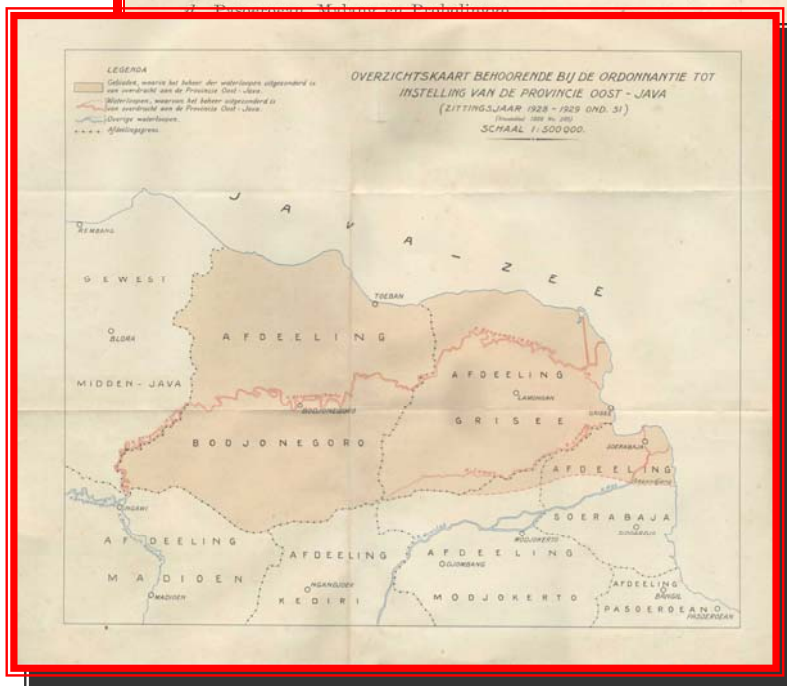
Artikel 2.

De zetel van het bestuur der provincie Oost-Java is Soerabaja.

Artikel 3.

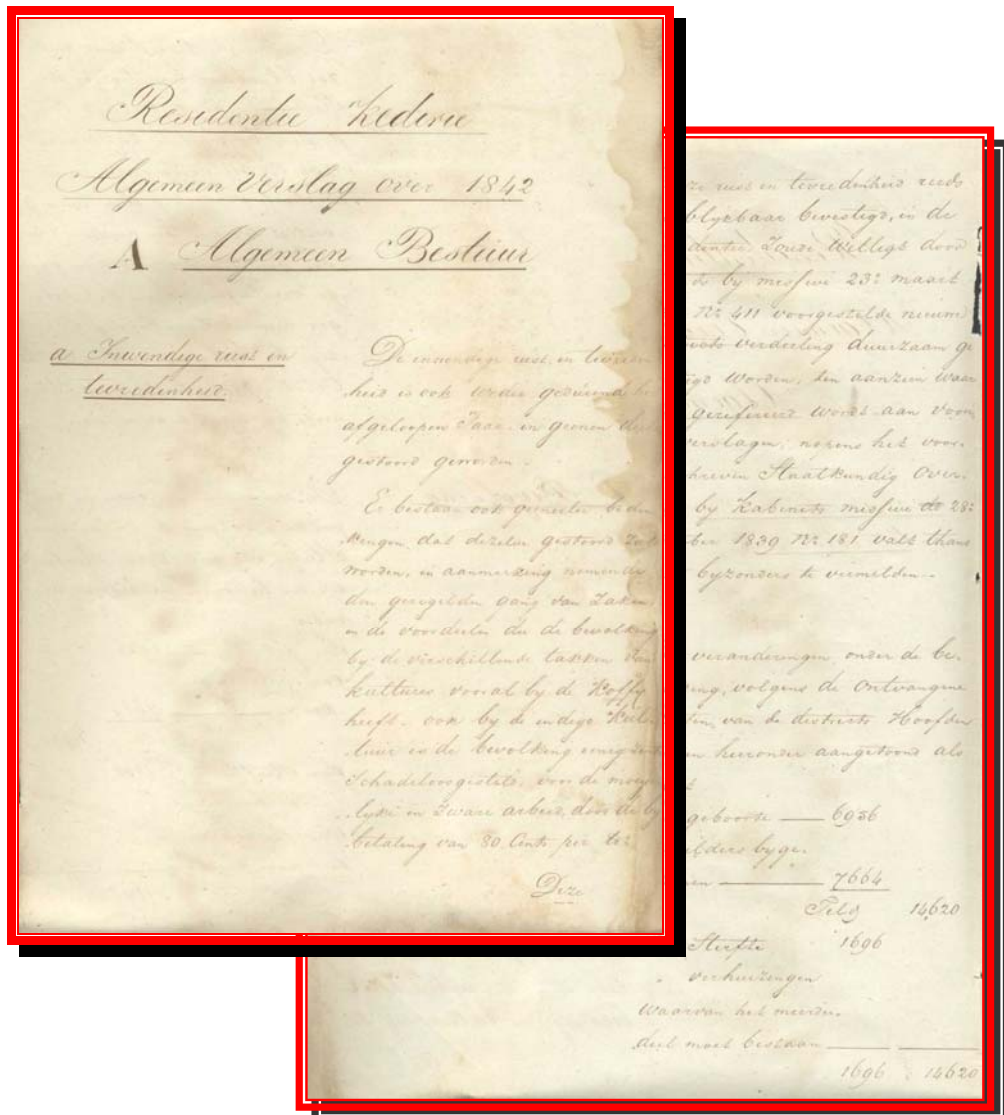
De ressorten en de plaatselijke raden van:

- a. Soerabaja, Modjokerto, Grisee en Bodjonegoro,
- b. Madioen en Ponorogo,
- c. Kediri en Blitar,



Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 1/X tanggal 9  
Agustus 1928 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur.

*Algemene Secretarie Stb No. 295*



Laporan Tahunan Residenti Kediri : laporan umum ini meliputi masalah kependudukan, politik, pengairan, pemerintahan, perdagangan, perkebunan, kehutanan, pendidikan dan keuangan. 1842.

*Kediri 11*

L. & A.

*Residentie Probolinggo. Ainst. Jan. 1860*

*Staat der Bevolking*

*over het jaar*

*1860.*

Wijk	Geslacht en leeftijd										Religieus										Totaal
	M	V	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	Christen	Hindoe	Budha	Islam	Andere	Andere	Andere	Andere	Andere	Andere	
Probolinggo	10	12	15	18	20	18	15	12	10	100	150	200	150	100	50	100	150	200	150	100	500
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Totaal	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

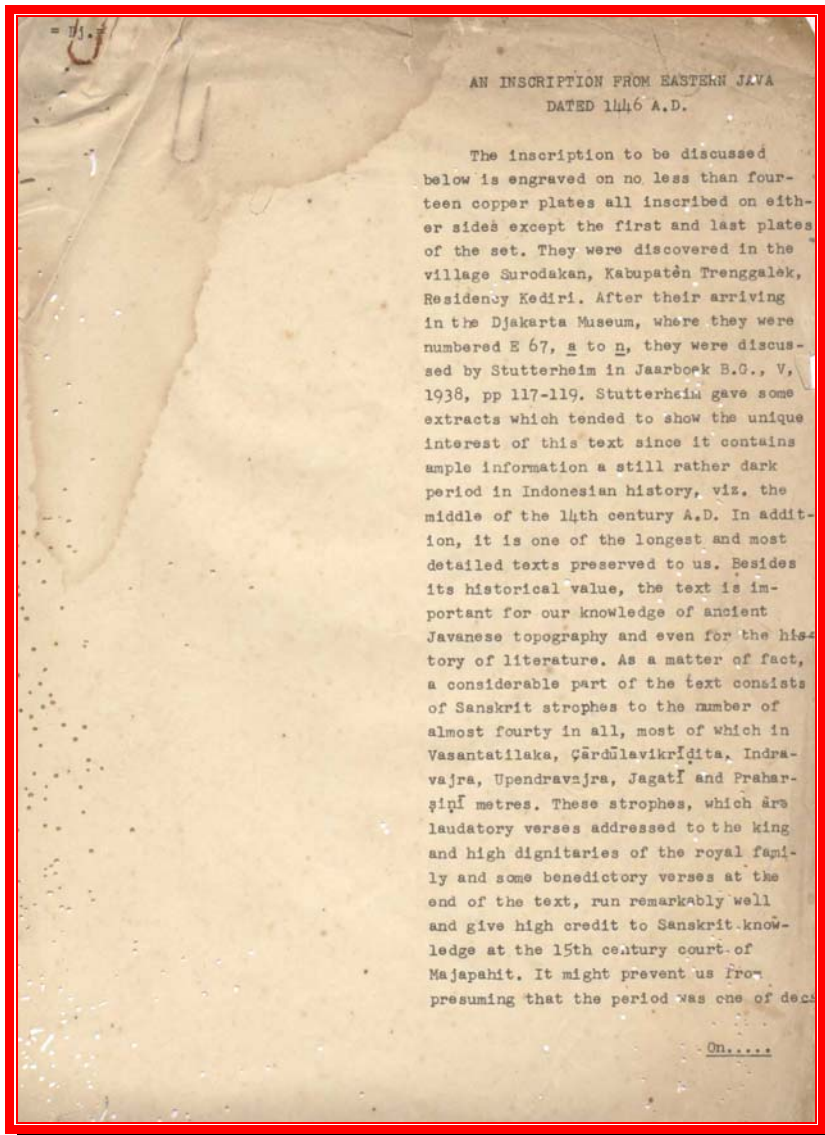
Laporan umum tentang jumlah penduduk Residentie Probolinggo 1860.  
*Probolinggo 6*



Kepala	Raden Ahi Sultan Kromo Dipin Ahi Negara	Anak dari Raden Ahi Sultan Kromo Dipin Kromo, Rajad di Sberabdin, nyang dudu munggal
Petuk	Masby Ahi dudu	Anak dari Ahi Sultan Kromo Dipin Kromo, Rajad di Sberabdin nyang dudu munggal.
Kawan kawan	Jogoby Prawira dudu	Anak dari Kawan Pakdimat Kudu Pakdimat
" Kijil	" Prawira dudu	Anak dari Jogoby Prawira dudu nyang dudu di Kantor Kromo
" "	" Prawira dudu	Anak dari Kawan Ahi Sultan Kromo Dipin Ahi Sultan Kromo, Rajad di Sberabdin, nyang dudu munggal
" Kadipaten	Masby Prawira dudu	Anak dari Masby Prawira dudu nyang dudu di Kantor Kromo
Pengawal	Masby Masby dudu	Anak dari Masby Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo
" "	Kawan Masby dudu	Anak dari Kawan Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo
Kepala kawan Kromo	Raden Ahi Sultan Kromo	Anak dari Raden Ahi Sultan Kromo Dipin Kromo, Rajad di Sberabdin, nyang dudu munggal
" "	Masby Masby dudu	Anak dari Masby Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo
Antarcalatan	Raden Masby dudu	Anak dari Raden Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo
" "	Masby Masby dudu	Anak dari Masby Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo
" "	Masby Masby dudu	Anak dari Masby Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo
" "	Masby Masby dudu	Anak dari Masby Masby dudu nyang dudu di Kantor Kromo

Daftar kepangkatan pegawai Bumiputera di Kadipaten Surabaya (nama pegawai, asal-usul, tanggal lahir, asal daerah dan daftar gaji), 15 November 1851

*Surabaya 985A*



Manuskrip "An Inscription From Eastern Java"  
tahun 1446 A.D  
*Moh. Yamin/590*

Model R. W. No. 13.

*Dec 23/12 - 3 I 23/12*

**UITTREKSEL** uit het Besluit van het Hoofd  
van het Kantoor voor Reiswezen.

No. **1647**

DECENTRALISATIE KANTOOR

*24-12-37*  
*Dec 13/5/23*

Batavia, 21 December 1937 1937.

**HET HOOFD VAN HET KANTOOR VOOR REISWEZEN.**

Gelesen het verzoekschrift, gedagteekend Soerabaja, 11 December 1937 van  
**Mr. W.A.H. Fuchter**, Burgemeester van Soerabaja, aldaar, en het daarop  
gesteld onderschrift van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 14  
December 1937 No. Dec. 13/5/8

Gelet op art. 42 der Ind. Comptabiliteitswet, art. 5 van het Gouv. besluit van 31 Juli 1920  
No. 30 (Bijblad No. 9570); op art. 5 van het Gouv. besluit van 21 April 1931 No. 16  
(S.B. 12339) in verband met het Gouv. Beal. van 13 April 1934 No. 32 (Bijblad No.  
13250).

**HEEFT BESLOTEN.**

Machtiging te verleenen om, met inachtneming van hetgeen bepaald is bij het Gouv. besluit  
van 10 December 1873 No. 6 (Bijblad op het Staatsblad No. 2718) aan

**den verzoeker**

ter bestrijding van de kosten verbonden aan de aanschaffing van een voor dienstgebruik bestem-  
den eigen automobiel uit te betalen een renteloos voorschot op zijne te verdienen bezoldiging van  
----- f 2850.- (twee duizend acht honderd vijftig gulden) -----  
en zulks met verrekening van het onangezuld gebleven gedeelte van het hem bij  
het dezz. besluit van 23 October 1935 No. 1091 voor hetzelfde doel verleend voorschot  
groot f 2850.- dan wel een lager bedrag indien later blijkt dat dit voldoende zou zijn geweest.

met bepaling dat:

de aansluiting van dit voorschot zal geschieden door inhoudingen op het salaris van  
f 50.- (vijftig gulden) mands, welke inhoudingen eveneens zullen plaats vinden,  
gedurende de maanden, dat de betrokkene onderworpen is aan korting op salaris wegens  
andere schulden aan den Lande;

Berkas arsip Walikota Surabaya Mr. W.A.H. Fuchter,  
berupa surat permohonan pembayaran gaji, surat  
pengangkatan, surat cuti, dan lain-lain, 1927 – 1935  
*Binnenlands Bestuur No. 1618*

## **Presiden mengangkat Menteri<sup>2</sup> dan Kepala<sup>2</sup> Daerah.**

Badan Penerangan mengoemoemkan:  
Presiden telah mengangkat Menteri-Menteri dan Kepala-kepala daerah sebagai dibawah:  
Menteri Dalam Negeri: R.A.A. Wiranatakoesoemah.  
Menteri Loear Negeri: Mr. A. Soebardjo.  
Menteri Kehakiman: Prof. Mr. Dr. Soepomo.  
Menteri Kemakmoeran: Ir. R. P. Soerachman.  
Menteri Keoeangan: Dr. Samsi.  
Menteri Kesehatan: Dr. R. Boentaran Martoatmodjo.  
Menteri Pengadjaran: Ki Hadjar Dewantara.  
Menteri Sosial: Mr. Iwa Koesoemasoemantri.  
Menteri Pertahanan: beloem diangkat.  
Menteri Penerangan: Mr. Amir Sjarifoedin.  
Menteri Perhoeboengan: R. Abikoeso Tjokrosoejoso ad. interin.

Sebagai Menteri-Menteri Negara ditetapkan Dr. Amir, Wachid Hasjim, Mr. Sartono, Mr. A. A. Maramis dan Oto Iskandar di Nata.

Ketoea Mahkamah Agoeng: Mr. Dr. Koesoema Atmadja.

Djaksa Agoeng: Mr. Gatot.  
Sekretaris Negara: Mr. Abd. Gafar Pringgodigdo.  
Djoeroebitjara Negara: R. Soekardjo Wirjopranoto.  
Goebnoer Djawa Barat: Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo.

Goebnoer Djawa Tengah: R. P. Soeroso.  
Goebnoer Djawa Timoer: R. M. T. A. Soerio.  
Goebnoer Soematera: Mr. Tengko Moehamad Hasan.

Goebnoer Borneo: Ir. Pangeran Moehamad Noer.  
Goebnoer Soelawesi: Dr. G. S. S. J. Ratoe Langie.  
Goebnoer Soenda Ketjil: Mr. I Goesti Ketoet Poedja.

Goebnoer Maloekoe: Mr. J. Latuharhary.

### **Residen-residen:**

Banten: R. Rg. Tirtasoejatna.  
Djakarta: Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo.

Priangan: R. Poeradiredja.  
Bogor: R. Ijok Moehamad Siradz.  
Tjirebon: R. M. A. Soeriatanoedibrata.

Banjoemas: Mr. R. P. Iskaq Tjokrodisoerjo.

Semarang: Mr. K. R. M. T. Wongsongoro.

Kedoe: R. P. Soeroso.

Pati: R. T. A. Milono.

Madioen: R. M. T. R. Koesnindar.

Kediri: R. Abd. Rahm. Pratalikrama.

Bodjonegoro: R. M. T. A. Soerio.

Soerabaja: R. Soedirman.

Besoeki: Mr. R. S. Boediarto Martoatmodjo.

Madoera: R. A. A. Tjakraningrat.

Malang: Mr. E. P. Singgih.

Pekalongan dan Djakarta Tokubetu SI beloem diangkat.

### **Pengangkatan wakil-wakil Residen.**

Priangan: M. Ardiwinangoen.  
Tjirebon: Dr. R. Moerdjani.

4 Orang Boepati diperbantoeakan.

A. Residen Banten: R. Zoelkarnain Soeriakartalegawa.

B. Residen Pati: R. M. Soedarso.

C. Residen Soerabaja: R. Setiono.

D. Residen Malang: R. I. Moehamad Soeljoedikoesoemo.

### **Presiden mengoetoes doea orang menteri negara.**

Kedaerah-daerah Keradaian.

Badan Penerangan mengoemoemkan:

Menteri-Menteri Negara Mr. A. A. Maramis dan Mr. Sartono kini telah berangkat kedaerah-daerah keradaian Soerakarta, Jogjakarta, Mangkoenegaran dan Pakoe Alam sebagai oetoesan Presiden Repoebliek Indonesia oentoek menjampaiakan piagam-piagam pene-tapan pada S. P. Soesoehoenun Soerakarta, S. P. Sultan Jogja-karta, S. P. Mangkoenegoro dan S. P. Pakoe Alam.

Pengumuman pengangkatan menteri-menteri dan kepala daerah oleh Presiden, tahun 1947.

*Stensilan Pamflet*

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 98 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 April 1951 No.U.P. 30/56/11 tentang usul pengangkatan T. Samadikun, Gubernur Propinsi Djawa Timur pada golongan VI/g dan surat Keputusan Kantor Urusan Pegawai tanggal 12 Mei 1951 No.P.4039;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 dan No.18 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur;  
2. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo. No.23 bagi segenap pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);  
3. Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 September 1950 mengangkat

T. S A M A D I K U N

pada jabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 dan 9 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan-penghasilan lain yang sjaah yang bersangkutan dengan jabatannya;  
dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannja, maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perencanaan Negara di Djakarta dan Surabaya,
6. Djawatan Perdjalaan Negeri,
7. Kantor Penetapan Pajak di Surabaya,
8. Kantor Gubernur Djawa Timur di Surabaya dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Djuni 1951.

*S*  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

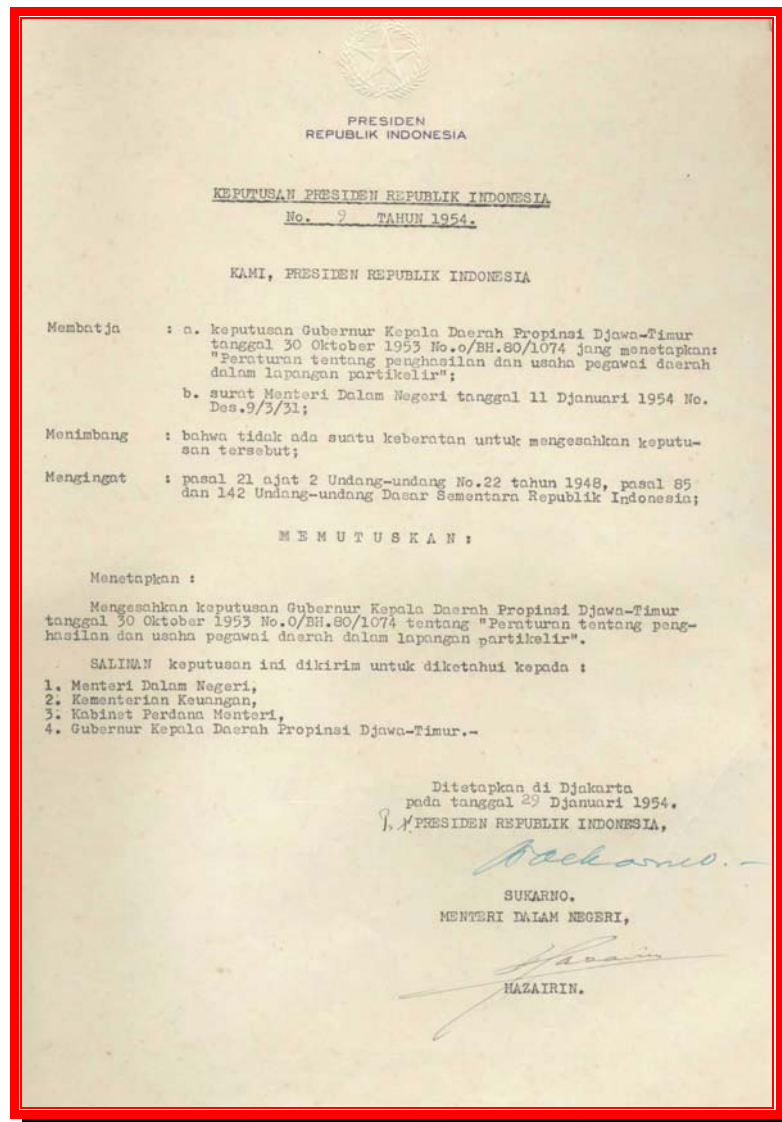
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

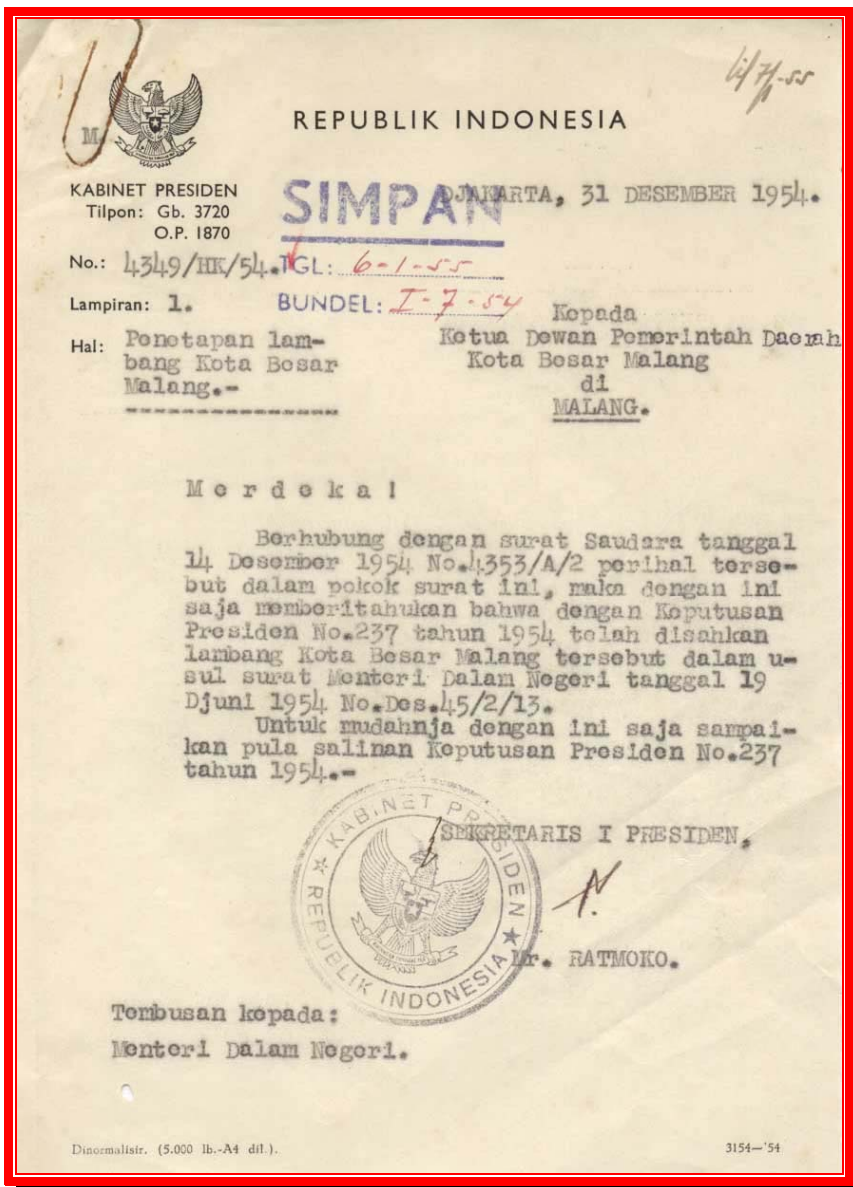
*Maaf*  
ISKAQ TJOERCHADISURJO.

Keputusan Presiden No.98 tanggal 5 Juni 1951 tentang kenaikan pangkat T. Samadikun Gubernur Kepala Daerah Khusus Provinsi Jawa Timur, dengan lampiran.

*Sekkab/319*



Keputusan Presiden No.9 tanggal 29 Januari 1954 tentang pengesahan keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1953 No.0/BH.80/1074 "Peraturan mengenai penghasilan dan usaha pegawai daerah dalam lapangan partikelir".  
*Sekkab/904*



Surat dari Sekretaris I Presiden Mr. Ratmoko kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Malang tanggal 31 Desember 1954 tentang penetapan lambang Kota Besar Malang dalam Keputusan Presiden No.237 Tahun 1954, dengan lampiran.

*Kabinet Presiden/878*

### I. PEMANDANGAN UMUM :

#### Geografis Daerah Karesidenan Madura :

Mengenai geografis Daerah Karesidenan Madura dalam tahun sebelumnya tidak ada perubahan.

Daerah Karesidenan Madura yang luasnya k.l. 4.500 KM<sup>2</sup> dibagi menjadi 11 Kabupaten, 20 Kawadanan, 63 Kotjanatan dan 986 desa, diantaranya 35 desa perdokan.

Kotjanatan Bulukerinci, Kawadanan Arosabaja, Kabupaten Bangkalan, dengan surat keputusan Konferensi Para Bupati No. 20-7-1954 No. Peri.20/2/43, diubah menjadi kotjanatan Klampis. Perubahan itu didasarkan kepada kenyataan, bahwa ibu kota Kotjanatan itu, memang di desa Klampis, dan lebih terkenal dengan nama Klampis, baik oleh instansi, maupun oleh umum.

#### Kondisi tanah :

Kondisi tanah dalam Karesidenan Madura pada umumnya bukan tanah pertanian yang baik, karena bertumpukan kapur dan padas dan pada musim kemarau kolihatannya menjadi d'ra gundul. Tanah yang dapat dimanfaatkan, sedikit sekali karena tidak terdapat sumber yang besar sendiri, sedang di benam. Seandainya dikotakan, tiga perempat abad yang lalu, Madura tidak gundul dan sepetak seperti sekarang ini, karena masih benjak hutang dan oleh karena itu waktu itu turunnja hutang rata-rata sebesar 6 bulan setahun, bahkan di beberapa tempat turunnja hutang ada 9 bulan setahun.

Akibat politik Pemerintah Penjajahan Belanda yang mengingini "KEMISKINAN" rakyat Madura, daerah itu dijadikan kuli di onderneming di Djawa Timur, maka hutang di Madura ditotong dan sampai akhir Pemerintahan Penjajahan Belanda, usaha untuk menghidupkan kembali pulsa Madura tidak disetujui.

Untuk memajukan daerah Madura tidak menjadi padang pasir, maka sejak tahun 1953 diadakan usaha menanam pohon-pohon getas besar-besaran, usaha mana lebih terkenal dengan nama "PENCIH-PIHIAN MADURA". Diresudkan usaha penghidupan Madura itu untuk dijadikan "GENERASI-PLAN", dan tjiat yang luhur itu mendapat sambutan yang besar sekali dari rakyat Madura, karena mereka mengingini benak kepentinannya.

Dicermink penghidupan yang diridjekan oleh rakyat sendiri, pun di Jawa P.P. Djawatan Perorten Rakjat serta Djawatan Kehutanan sama dengan riat membunam hutang dan buehja usaha itu telah tampak, terutama di desa Terak (Kabupaten Bangkalan).

Dengan dieler penghidupan itu, sudah tentu kelak keadaan tanah di Madura akan menjadi lebih baik dari keadaan pada ini waktu.

#### Penduduk :

Jumlah penduduk daerah Karesidenan Madura pada akhir tahun sebelumnya ada 1.229.006 jiwa, ini berarti k.l. 120 orang tiap Km<sup>2</sup>. Angka ini menunjukkan bahwa daerah Madura penduduknya padat. Diantar dibuktikan, bahwa daerah Madura yang tanahnya kurang, tidak subur, keadaannya tidak subur, penghidupan penduduknya kurang baik, kekurangan bahan makanan.

Tambahnya penduduk tiap tahun merupakan hal yang penting dalam kehidupan penduduk Madura yang sudah menderita.

Satu-satunya usaha disamping memperbaiki hasil bumi untuk meningkatkan penduduk rakjat, ialah mencari banjaknya di lain, dengan jalan pemindahan penduduk atau transmigrasi ke luar daerah setjara-beser-besaran.

Tetapi seane ini tidak mudah dilaksanakan karena orang Madura tidak suka pindah, tidak suka meninggalkan kampung halamannya untuk pindah di lain daerah, melainkan dengan suka rela.  
Orang Madura .....

Laporan tahunan dari Residen Madura R. Soenarto Hadiwidjojo tahun 1954, 21 Maret 1955 tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, rekonstruksi, agraria dan Biro Penyelesaian Golongan Kecil.

*Kabinet Presiden/882*





Pelantikan Bupati baru Bojonegoro Kusno Soeroatmodjo:  
Saat penyumpahan pada upacara pelantikan bupati baru  
Bojonegoro, Sdr. Kusno Soeroatmodjo, 30 September 1951.  
*Jawatan Penerangan No.5*



Pelantikan Bupati baru Bojonegoro Kusno Soeroatmodjo:  
Sambutan Residen Bojonegoro Mochtar Prabu pada upacara  
pelantikan bupati baru Bojonegoro Kusno Soeroatmodjo,  
30 September 1951.

*Jawatan Penerangan No.3*



Upacara Pelantikan Kepala Daerah Pilihan Kabupaten  
Modjokerto, 11 Maret 1958  
*Jawatan Penerangan No. 1*



Upacara Pelantikan Kepala Daerah Pilihan Kabupaten  
Modjokerto: Saat penandatanganan pada pelantikan Kepala  
Daerah pilihan Kabupaten Mojokerto, 11 Maret 1958  
*Jawatan Penerangan No.3 – 5*



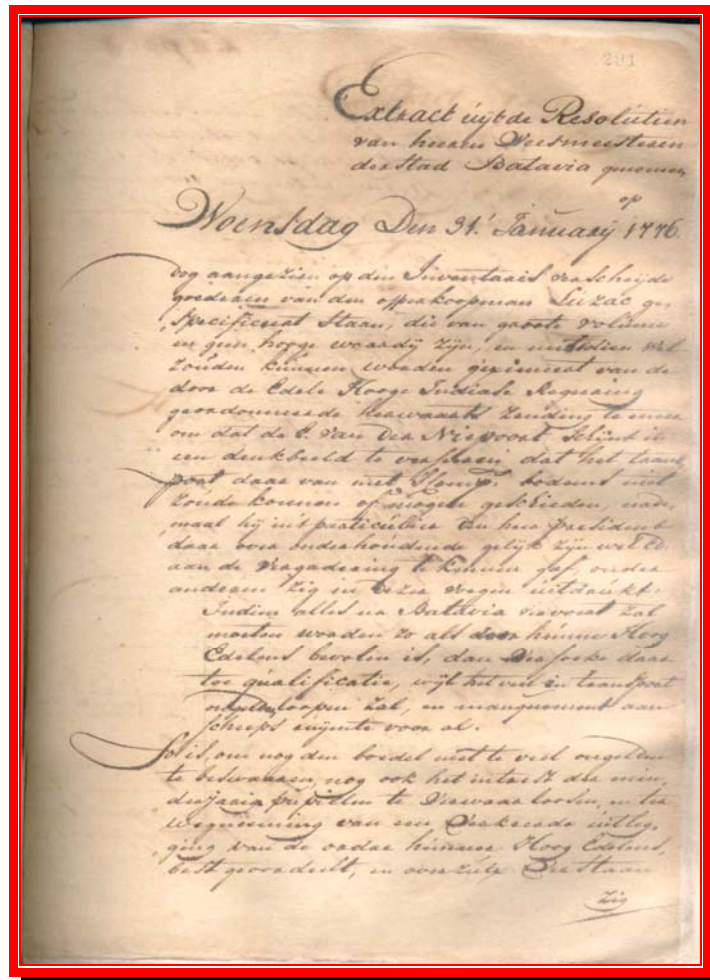
Upacara Pelantikan Kepala Daerah Pilihan Kabupaten  
Modjokerto: Saat penyumpahan pada pelantikan Kepala  
Daerah pilihan Kabupaten Mojokerto, 11 Maret 1958.

*Jawatan Penerangan No.2*



Gedung Balai Kota (Raad Huis) Blitar Jawa Timur  
*KIT 0771/054*

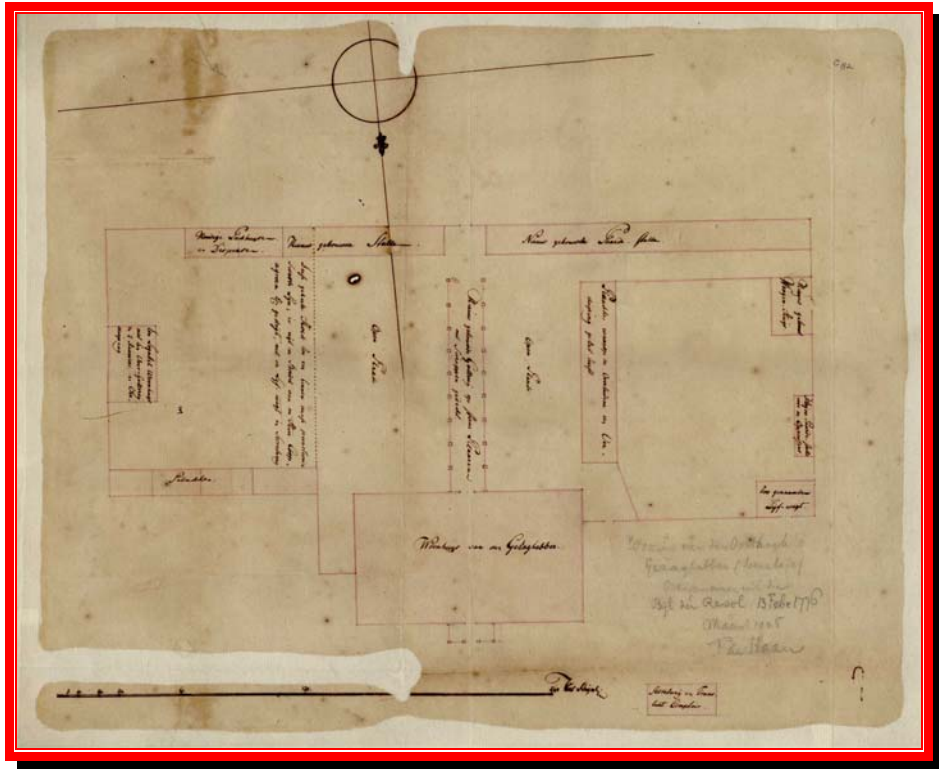
# PARLEMEN



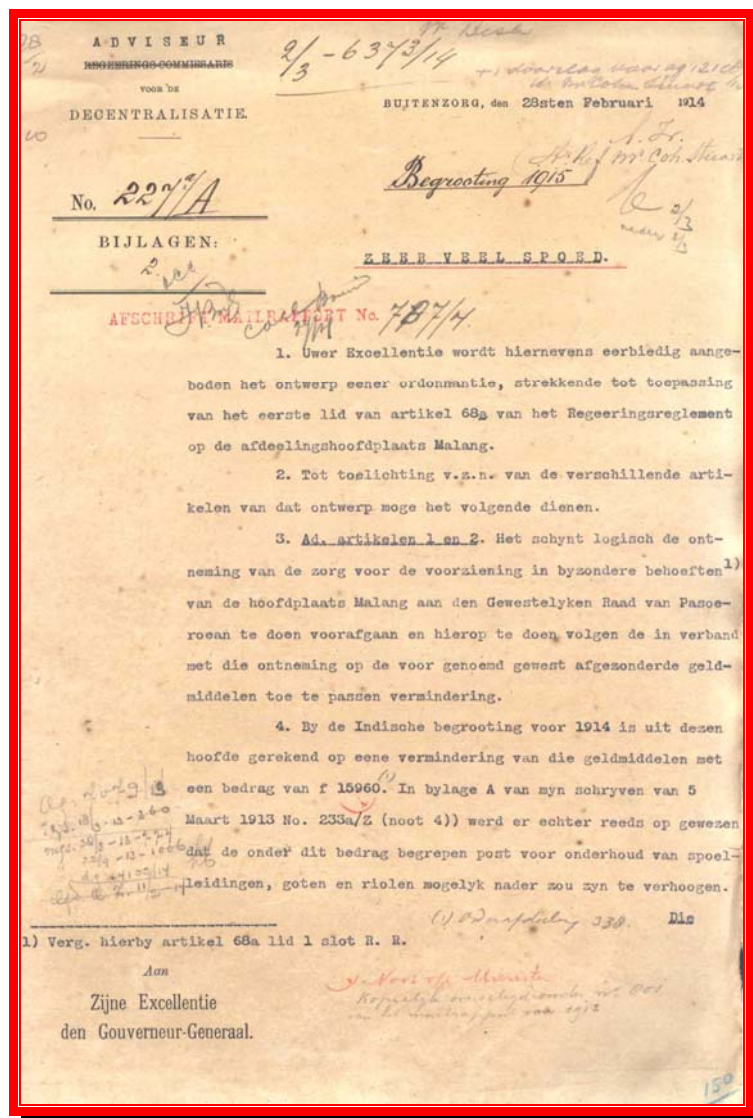
Keputusan Lembaga Urusan Warisan tanggal 31 Januari 1776 tentang daftar harta kekayaan Luzac (pejabat tinggi di Surabaya pada masa VOC). Disertai dengan Peta dari Koleksi De Haan C 82.

*Hoge Regering 1603*





Denah tempat tinggal Luzac pejabat tinggi di Surabaya pada masa VOC. 1776  
De Haan No. C 82



Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 11 tanggal 25 Maret 1914 tentang pembentukan Dewan Kotapraja Malang disertai peta perbatasan ibukota Malang. [Algemene Secretarie No. 2277A](#)

# Daftar Arsip Jawa Timur yang Diserahkan

## GEOGRAFIS

1. Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland van 24 Mei 1887 No. 2/C over Grenzen van de hoofdplaats Besoeki, de hoofdplaats Sitoebondo der afdeeling Panaroekan, de plaats Panaroekan en de hoofdplaatsen der afdeelingen Bondowoso, Djember en Banjoewangi.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.2/C tanggal 24 Mei 1887 tentang perbatasan wilayah Besuki, Situbondo, Panarukan, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi.

Algemene Secretarie Stb No. 101

3 lembar

2. Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland van 13 Augustus 1887 No. 1/C over Grenzen van de hoofdplaats Madioen, en de hoofdplaatsen der afdeelingen Magetan, Ngawi, Ponorogo en Patjitan.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.1/C tanggal 13 Agustus 1887 tentang perbatasan wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Algemene Secretarie Stb No. 147

3 lembar

3. Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland van 12 September 1887 No. 1/C over Grenzen van de hoofdplaats Probolinggo, en de hoofdplaatsen der afdeelingen Kraksaan en Loemadjang.

Surat Keputusan Guberbur Jenderal No.1/C tanggal 12 September 1887 tentang perbatasan wilayah Probolinggo, Kraksaan dan Lumajang.

Algemene Secretarie Stb no. 166

3 lembar

4. Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland van 20 September 1887 No. 2/C over Grenzen van de hoofdplaats Soerabaja en de hoofdplaatsen der afdeelingen Sidoardjo, Modjokerto, Djombang, Grisee, Sidajoe en Lamongan.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 2/C tanggal 20 September 1887 tentang perbatasan wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Sidayu dan Lamongan.

Algemene Secretarie Stb No. 172

4 lembar

5. Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland van 17 October 1887 No. 2/C over Grenzen van de hoofdplaats Kediri en de hoofdplaats der afdeeling Blitar.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 2/C tanggal 17 Oktober 1887 tentang perbatasan wilayah Kediri dan Blitar.

Algemene Secretarie Stb No. 187

2 lembar

6. Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland van 27 October 1887 No. 2/C over Grenzen van de hoofdplaats Pasoroean en de hoofdplaatsen der afdeelingen Bangil en Malang.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 2/C tanggal 27 Oktober 1887 tentang perbatasan wilayah Pasuruan, Bangil dan Malang.

Algemene Secretarie Stb No. 194

3 lembar

7. Schets of penteekening der Residentie Soerabaja  
Sketsa daerah Residensi Surabaya.

*F. de Haan No. E29*

8. Kaart van Residentie Kediri. 1840  
Peta wilayah Residensi Kediri. 1840

*F. de Haan No. G47*

9. Kaart van Grissee  
Peta wilayah Gresik. Tanpa Tahun

*F. de Haan No. F50*

10. Surabaya in 1811 – 1816  
Peta wilayah Surabaya sekitar tahun 1811 – 1816.

*F. de Haan No. K50*

11. Topograpische Hoofdplaats Madioen  
Peta Topografi Ibu Kota Madiun  
Scala 1 : 5000, 1917

*Koleksi Peta Topografi No. 1293*

12. Rencana Kota Pasuruan  
Februari 1946

*Koleksi Town Plan No. 1297*

13. Topografische beschrijving der Assistant Resident Patjitan.  
Uraian topografis tentang Residensi Pacitan yang ditulis oleh  
Asisten Residen Pacitan, disertai dengan batas-batas wilayah  
dan jumlah penduduk. 1845 – 1846

*Madiun 6*

40 lembar dari 1 banden

14. Pengumuman Gubernur Jendral tanggal 29 Agustus 1947  
tentang batas demarkasi daerah Jawa, Madura, Sumatra,  
bahasa Belanda.

*Delegasi Indonesia/81*

2 lembar

## **PEMERINTAHAN**

15. Dorps en districts gewijze uitkomsten van den detailed  
settlement op Distrik Probolinggo over 1812.  
Daftar penduduk pada Distrik Probolinggo berdasarkan desa  
dan distrik pada tahun 1812.

*Besoeki 11 / 1*

26 lembar dari 1 banden

16. Besluit van den Gouverneur Generaal van 9 Augustus 1928  
No. 1X over instelling van de Provincien Oost Java.  
Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 1/X tanggal 9 Agustus  
1928 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur.  
*Algemene Secretarie Stb No. 295*  
14 lembar
17. Residentie Kediri Algemeen Verslag over 1842.  
Laporan Tahunan Residensi Kediri; laporan umum ini meliputi  
masalah kependudukan, politik, pengairan, pemerintahan,  
perdagangan, perkebunan, kehutanan, pendidikan dan  
keuangan. 1842.  
*Kediri 11*  
22 lembar dari 1 banden
18. Staat der bevolking over Residentie Probolinggo dienstjaar  
1860.  
Laporan umum tentang jumlah penduduk Residensi  
Probolinggo 1860.  
*Probolinggo 6*  
3 lembar dari 1 banden
19. Daftar kepangkatan pegawai Bumiputera di Kadipaten  
Surabaya (nama pegawai, asal-usul, tanggal lahir, asal  
daerah dan daftar gaji), 15 November 1851  
*Surabaya 985A*  
15 lembar dari 1 banden



20. Manuskrip "An Inscription From Eastern Java" tahun 1446  
A.D

*Moh. Yamin/590*

26 lembar

21. Berkas arsip Walikota Surabaya Mr. W.A.H. Fuchter, berupa surat permohonan pembayaran gaji, surat pengangkatan, surat cuti, dan lain-lain, 1927 – 1935

*Binnenlands Bestuur No. 1618*

7 lembar

22. Pengumuman pengangkatan menteri-menteri dan kepala daerah oleh Presiden, tahun 1947.

*Stensilan Pamflet*

1 lembar

23. Keputusan Presiden No.98 tanggal 5 Juni 1951 tentang kenaikan pangkat T. Samadikun Gubernur Kepala Daerah Khusus Provinsi Jawa Timur, dengan lampiran.

*Sekkab/319*

2 lembar

24. Keputusan Presiden No.9 tanggal 29 Januari 1954 tentang pengesahan keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1953 No.0/BH.80/1074 "Peraturan mengenai penghasilan dan usaha pegawai daerah dalam lapangan partikelir".

*Sekkab/904*

1 lembar

25. Surat dari Sekretaris I Presiden Mr. Ratmoko kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Malang tanggal 31 Desember 1954 tentang penetapan lambang Kota Besar Malang dalam Keputusan Presiden No.237 Tahun 1954, dengan lampiran.

*Kabinet Presiden/878*

3 lembar

26. Laporan tahunan dari Residen Madura R. Soenarto Hadiwidjojo tahun 1954, 21 Maret 1955 tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, rekonstruksi, agraria dan Biro Penyelesaian Golongan Kecil.

*Kabinet Presiden/882*

130 lembar

27. Pelantikan Bupati baru Bojonegoro Kusno Soeroatmodjo : Saat penyumpahan pada upacara pelantikan bupati baru Bojonegoro Sdr. Kusno Soeroatmodjo, 30 September 1951.

*Jawatan Penerangan No.5*

28. Pelantikan Bupati baru Bojonegoro Kusno Soeroatmodjo : Sambutan Residen Bojonegoro Mochtar Prabu pada upacara pelantikan bupati baru Bojonegoro Kusno Soeroatmodjo, 30 September 1951.

*Jawatan Penerangan No.3*

29. Upacara Pelantikan Kepala Daerah Pilihan Kabupaten Modjokerto, 11 Maret 1958

*Jawatan Penerangan No. 1*

30. Upacara Pelantikan Kepala Daerah Pilihan Kabupaten Mojokerto : Saat penandatanganan pada pelantikan Kepala Daerah pilihan Kabupaten Mojokerto, 11 Maret 1958

*Jawatan Penerangan No.3 - 5*

31. Upacara Pelantikan Kepala Daerah Pilihan Kabupaten Mojokerto : Saat penyempahan pada pelantikan Kepala Daerah pilihan Kabupaten Mojokerto, 11 Maret 1958.

*Jawatan Penerangan No.2*

32. Gedung Balai Kota (Raad Huis) Blitar Jawa Timur

*KIT 0771/054*

## **PARLEMEN**

33. Extract resolutie van Weesmesteren gedated 31 January 1776 over den inventaris van verscheijde goederen van den opperkoopman Luzac (gezaghebber van de Oosthoek te Soerabaija). Met bijlagen van de Haan C 82.

Keputusan Lembaga Urusan Warisan tanggal 31 Januari 1776 tentang daftar harta kekayaan Luzac (pejabat tinggi di Surabaya pada masa VOC). Disertai dengan Peta dari Koleksi De Haan C 82.

Hoge Regering 1603

5 lembar

34. Plattegrond van de woning van de gezaghebber van de Oosthoek te Soerabaija. 1776.

Denah tempat tinggal Luzac pejabat tinggi di Surabaya pada masa VOC. 1776

De Haan No. C 82

35. Besluit van Gouverneur van Nederlands Indie van 25 Maart 1914 No. 11 over instelling van een gemeenteraad van Malang, met grenzen van de hoofdplaats van Malang.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 11 tanggal 25 Maret 1914 tentang pembentukan Dewan Kotapraja Malang disertai peta perbatasan ibukota Malang.

Algemene Secretarie No.2277A

16 lembar

36. Benoeming leden provincialen Raad Oost Java.

Pengangkatan Dewan Provinsi Jawa Timur, disertai daftar nama calon dewan dan surat keputusan penetapan anggota DPR, 1938 – 1941

*Binnenlands Bestuur No. 1737*

24 lembar dari 1 banden

37. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surabaya yang dipimpin oleh Bupati, 6 September 1951.

*Kempen 510906 HN 3 – 1*

## **POLITIK**

38. Laporan hasil peninjauan ke Ponorogo, Magetan dan Ngawi dari Pimpinan Pusat kepada Soerawa dan Marsidi No.I tanggal 1 April 1946 tentang kegiatan PESINDO, GPII, PPI, PPKI, Barisan Banteng, AMK, IPI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

*Kempen/90*

2 lembar

39. Surat dari Pemimpin Jawatan Penerangan Karesidenan Madiun, Moeljadi, kepada Kementerian Penerangan tanggal 6 Agustus 1947 tentang hasil pertemuan di Balai Permusyawaratan Kantor Kota Madiun pada tanggal 5 Agustus 1947 yang dihadiri wakil-wakil dari 20 partai atau badan mengenai penjelasan pendirian Pemerintah terhadap putusan Sidang Dewan Keamanan UNO dan amanat Panglima Tertinggi "Pemberhentian Permusuhan Indonesia – Belanda".

*Kempen/92*

2 lembar

40. Laporan Rapat Comite Persiapan Kedudukan Jawa Timur di Gedung Nasional Indonesia Bubutan, Surabaya, pada tanggal 25 Januari 1948 dengan tujuan "mendirikan Negara Jawa Timur" oleh Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1948 dengan ketuanya Drs. Ch. Kariman Cs. Hasil rapat tidak menyetujui rencana pendirian Negara Jawa Timur, karena tidak mau terpecah belah.

*Kempen/159*

7 lembar

41. Surat-surat tanggal 8 Oktober, 17, 23 Nopember 1948 tentang tanggapan terhadap Peristiwa Madiun 1948.

*Kempen/241*

5 lembar

## KUNJUNGAN PRESIDEN

42. Sambutan rakyat di Stasiun Gubeng Surabaya waktu Presiden Soekarno mengadakan perjalanannya dengan kereta api ke Malang, Mei 1951.

*Kempen 510921 HN 4*

43. Para pejabat yang hadir pada kunjungan Presiden Soekarno di Surabaya; tampak Kolonel Nazir, pejabat Kepala Penataran Abu Surabaya, Pringgodigdo.

*Kempen 7-22-4*

44. Para pejabat yang hadir pada kunjungan Presiden di Surabaya; tampak Ruslan Abdul Gani, Kolonel Bambang Sugeng

*Kempen 513325*

45. Presiden Soekarno sedang memberikan sambutan di Malang dalam rangka perjalanan ke Jawa Timur, Madura dan Bali, Mei 1951

*Kempen 7-14-2*

46. Pemandangan dalam rapat keamanan di Malang sehubungan dengan perjalanan Presiden Soekarno ke Jawa Timur

*Kempen 513477*

47. Kunjungan Presiden Soekarno di Badan Rekonstruksi Nasional di Pamekasan Madura, 10 Mei 1951

*Kempen 513351*

48. Kunjungan Presiden didampingi oleh Gubernur Sudiro (paling kanan), Bangkalan Madura, 10 Mei 1951

*Kempen 513374*

49. Presiden Soekarno mengunjungi Asrama Rehabilitasi Tentara Pejuang di Sumenep, 10 Mei 1951

*Kempen 7 – 6 – 1, 513370, 513377*

50. Presiden Soekarno mengunjungi PN Garam Kaliangat di Sampang Madura, 10 Mei 1951

*Kempen 513375, 513384*

51. Perdana Menteri Sukiman dan rombongan tiba di lapangan terbang Morokrembangan Surabaya disambut oleh Gubernur Jatim Samadikun, 13 September 1951.

*Kempen 2*

52. Perdana Menteri beserta rombongan di tempat kediaman Gubernur Samadikun, dari kiri ke kanan Menteri Iskaq, Perdana Menteri, Gubernur Samadikun, Kol. Bambang Sugeng, Kol. Nazir, Menteri Soeroso, Kepala Polisi Negara Sukamto, 13 September 1951.

*Kempen 5*

53. Upacara penyambutan pada saat Presiden Soekarno berkunjung ke Akademi Angkatan Laut di Surabaya, 1958

*Kempen 580311 HN 5*

54. Menteri Penerangan Soedibyo mengunjungi Jawatan Penerangan di Kabupaten Panarukan, Oktober 1958

*DJawatan Penerangan 1/60*

55. Acara ramah tamah dengan Menteri Penerangan Soedibyo dalam rangka kunjungan ke Kabupaten Panarukan, Oktober 1958.

*DJawatan Penerangan 1/15*

56. Upacara penyambutan dalam rangka kunjungan Mr. Sartono di Akademi Angkatan Laut Surabaya, 1958.

*Kempen 580214 HN 13*

57. Pengalungan bunga kepada Presiden India Rajendra Prasad dalam kunjungan ke Surabaya, 14 Desember 1958.

*Djapenpro Jawa Timur 1 c 417*

58. Upacara penyambutan kedatangan Presiden India Rajendra Prasad ke Surabaya, 14 Desember 1958

*Djapenpro Jawa Timur 1 c 400*

## **PENDIDIKAN**

59. Pak Doho wakil dari Kwartier Besar Jawa Timur dengan "Api – Djandji" nya memulai upacara pembakaran api unggun dalam perayaan Hari Baden Powell di Surabaya, 22 Pebruari 1951.

*Djapen Djatim*

60. Pembakaran api unggun diikuti oleh wakil-wakil dari berbagai organisasi kepanduan pada hari Baden Powell di Surabaya, 22 Pebruari 1951.

*Djapen Djatim*

61. Upacara peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, 3 Maret 1951 : Upacara peresmian pembukaan

*Djapen Jawa Timur 5*



62. Upacara peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, 3 Maret 1951 : Selamat datang di Surabaya. Penyambutan kedatangan Dr. Bahder Djohan oleh para dosen Fakultas Kedokteran Surabaya.

*Kempen 950.704 AV 9*

63. Upacara peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, 3 Maret 1951 : Suasana dalam laboratorium

*Kempen K 511218 HN 18*

64. Peresmian Balai Pendidikan Masyarakat Desa di Blitar, Jawa Timur; pengguntingan pita oleh Gubernur Jawa Timur, Samadikun, 4 Juni 1951

*Djapen Jawa Timur 1*

65. Peresmian Balai Pendidikan Masyarakat Jatim; sambutan Menteri Pertanian Ir. Soewarto, 4 Juni 1951

*Djapen Jawa Timur 3*

66. Peresmian Pondok Moderen Gontor di Ponorogo ; Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Timur dan para kyai serta pembesar-pembesar lain mengelilingi Pondok Pesantren, 28 Oktober 1951.

*Kempen 950704 AV 2*

67. Peresmian Pondok Moderen Gontor di Ponorogo; Ruang pelajar pondok pesantren Gontor di Ponorogo, 28 Oktober 1951.

*Kempen 950704 AV 1*

68. Pidato Presiden pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1959 di Surabaya, dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

*Pidato Presiden/125*

36 lembar

69. Kaum wanita pada kursus pemberantasan buta huruf di Banyuwangi, 24 April 1960

*Kempen 600424 HZ 3*

## **JURNALISTIK**

70. Pertemuan ramah tamah di restoran Hellendeern para peserta Konferensi Perusahaan Surat Kabar di Surabaya, yang dihadiri oleh Walikota Doel Arnowo, Kol. Bambang Soegeng, Wakil G.I.A dan beberapa wartawan Belanda, 11 September 1951.

*Djapen Djatim M. Ramlan*

71. Suasana Konperensi Perusahaan Surat Kabar di Surabaya yang dipimpin oleh Ketua SPS sdr. Djamal Ali, sebelah kanan penulis sdr. S. Tjokrosisworo. Duduk dibarisan muka no.2 dari kanan sdr. Abd. Wahab Pemimpin Umum Djapenprop Djatim, 11 September 1951.

*Djapen Djatim M. Ramlan*

72. Suasana sidang pada Konferensi Dinas Kementerian Penerangan ke-IX di Surabaya, 15 – 17 Maret 1958

*Djapenpro Djawa Timur*

5 lembar

73. Serah terima jabatan Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, 29 Nopember 1958.

*Kempen 5f 1224*

## **HUKUM**

74. Maklumat Jaksa Agung Mr. R. Kasman Singodimedjo No.3 tanggal 15 Januari 1946 kepada Tuan Gubernur dan Residen, para Jaksa dan Kepala Polisi tentang ajakan untuk membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yaitu suatu negara yang selalu menyelenggarakan pengadilan yang cepat dan tepat, serta anjuran untuk segera menyelesaikan perkara-perkara kriminal yang belum terselesaikan pemeriksaan awalnya, dan tuntutan kepada polisi dan jaksa untuk selalu menyelaraskan diri dengan pembangunan negara yang berdasarkan hukum dengan bantuan para hakim.

*Kempen/30*

1 lembar

75. Penetapan Pemerintah No.1 Tahun 1947 tanggal 21 Juni 1947 tentang penunjukan tempat kedudukan sementara Pengadilan Tinggi di Surabaya ibu kota Malang, dengan lampiran.

*SETNEG/240*

3 lembar

76. Maklumat dari Panglima Tentara Belanda di Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1948 tentang larangan membawa atau menyimpan senjata api, pedang, alat peledak dan senjata berbahaya lainnya tanpa seijin pimpinan Tentara Jawa Timur atau pimpinan Pemerintahan Sementara. Jika kedapatan melanggar undang-undang ini maka akan dituntut pada pengadilan dengan hukuman mati atau penjara.

*Peta/1948*

1 lembar

77. Berkas pengesahan Keputusan Presiden No.237 tahun 1951 tentang perubahan Boschbeschermingsverordening (pengaturan perlindungan hutan), di Provinsi Jawa Timur, 8 Desember 1933.

*Sekkab/455*

2 lembar

## **KESENIAN DAN PARIWISATA**

78. Candi Panataran pada saat renovasi, Blitar, Jawa Timur, 1917

*KIT 1189/066*

79. Candi Panataran sesudah renovasi, Blitar, Jawa Timur, 1918

*KIT 1193/23*

80. Danau Sarangan di kaki Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur

*KIT 0961/085*

81. Karapan sapi di Madura, 1924

*KIT 83/60*

82. Suasana pagi di selatan Pulau Cambah, Kepulauan Noesa Baroeng, Jawa Timur. 1938

*KIT 964/60*

83. Pertunjukan tari Serimpi, 11 November 1952.

Djawatan Penerangan K 521111 HN 4-1

84. Pertunjukan tari Djangor

Djawatan Penerangan No 23

85. Pertunjukan Wayang Orang

Djawatan Penerangan No 23

86. Pertunjukan Reog Ponorogo

Djawatan Penerangan No 23

## **TRANSPORTASI**

87. Brieven van het hoofd van den Provincialen Waterstaat van Oost Java aan den Directeur van Verkeer en Waterstaat te Bandoeng d.t.k. van den Gouverneur van Provincie Oost Java te Soerabaija over voltooid werk het verbeteren van gedeelten van den weg Sidoarjo – Toeban tot den totale lengte van 1545 milyun.

Surat dari Kepala Pengairan Provinsi Jawa Timur kepada Direktur pengairan Bandung dan gubernur Jawa Timur tentang penyelesaian pekerjaan perbaikan sebagian dari jalur perjalanan Sidoarjo – Tuban dengan total biaya 1545 juta. 19 September 1938 – 28 Agustus 1939

BOW No. BV 42

20 lembar

88. Jembatan gantung yang digunakan untuk lokomotif di hutan jati Jawa Timur

*KIT 0658/072*

89. Kereta ketel pabrik, Kediri, Jawa Timur, 1950

*KIT 0134/082*

90. Pengangkutan kayu dengan menggunakan alat tradisional dan mesin serta tenaga orang, 5 Desember 1951.

*Kempen 511205 HZ 8, HZ 16, HZ 21*

## **PEMBANGUNAN**

91. Berkas pelaksanaan pekerjaan pembangunan waduk di Sungai Konto, daerah Selaredjo, Residensi Pasuruan, disertai dengan surat ijin pembangunan dan peta lokasi, bahasa Belanda. 1917 – 1918

*BOW EV 7*

39 lembar / dari 1 band

92. Berkas korespondensi tentang pembangunan Stasiun Mojokerto yang merupakan bagian dari jalur kereta api Surabaya – Solo, Bahasa Belanda. 1927

*BINENLANDS BESTUUR NO. 1690*

3 lembar dari 1 band

93. Berkas pembangunan Station Radio Pemancar untuk Lapangan Udara "Darmo" di Surabaya, disertai estimasi biaya dan peta lokasi, bahasa Belanda. 1938

*BOW BL 146*

26 lembar / dari 1 band

94. Berkas tentang perluasan kantor dan laboratorium tanggal 25 April 1940 – 16 Agustus 1940 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, disertai peta biru bangunan laboratorium.

*BOW AX 29*

10 lembar dari 1 band

95. Bendungan irigasi pengairan Jatiroto, Jember

*KIT 0067/041*

96. Pembangunan waduk untuk pertanian di Surabaya, 1951

*Djawatan Penerangan Provinsi Jatim II – 2*

97. Lamongan terkenal sebagai daerah minus, karena itu Djawatan Pengairan giat untuk membangun kembali Waduk Pridjetan

*Kempen 3,4,5*

98. Pembangunan perikanan di Kalen, Lamongan, seluas 4 ha, akan dipelihara ikan mudjaer dan tombro

*KIT C/30383 I, II,*

99. Perikanan tambak dipantai laut Madura, 1951.

*Kempen R511213 FG 2 - 7*

100. Pembangunan jembatan untuk mempermudah hubungan lalu lintas didaerah Pasuruan, Juni-Juli 1951

*Djawatan Penerangan Pasuruan 3*

101. Pembangunan perumahan di Kabupaten Pasuruan Juni-Juli 1951

*Jawatan Penerangan Pasuruan 8*

102. Upacara peletakan batu pertama Tugu Pahlawan Surabaya oleh Presiden Soekarno, 10 November 1951.

*Kempen K511110 HN 8*

103. Penandatanganan piagam peletakan batu pertama Tugu Pahlawan oleh Gubernur Jawa Timur Samadikun, 10 November 1951.

*Kempen K511110HN12*

104. Suatu rencana pikiran tanggal 17 Agustus 1959 tentang anggota DPAS dan DEPERNAS yang berjuang di Jawa Timur semasa Revolusi 1945 akan membentuk suatu ikatan untuk pembangunan di Jawa Timur agar terlaksana masyarakat adil makmur.

*Roeslan Abdulgani/84*

1 lembar

## **INDUSTRI**

105. Gedung Bank Kredit Rakyat, Bondowoso, Jawa Timur 1912

*KIT 0055/001*

106. Pembukaan Bank Indonesia cabang Besuki di Jember; pengguntingan pita oleh istri Panglima Divisi V Kolonel Sarbini, 8 Februari 1958

*Djapenpro Djawa Timur 3a 12*

107. Zout fabriek te Kalianget aanvoer van zout in tank wagens met trein.

Jalur kereta untuk pengangkut garam menuju Pabrik Garam Kalianget , Jawa Timur.

*KIT 521/10*

108. Zoutfabriek te Kalianget goedang met verpakt zout

*KIT 516/84*



109. Pemandangan di sekitar kompleks pabrik semen Gresik,  
Nopember – Desember 1956.

*Kempen 561113 HN204110, 561218HN1-2*

110. Pengolahan gaplek menjadi tepung di pabrik Surabaya Jawa  
Timur

*KIT 1119/052*

111. Pabrik tepung tapioka "Toeren" Malang Jawa Timur

*KIT 565/034*

112. Mesin percetakan garam di pabrik garam Kalianget, Jawa  
Timur, Mei 1951

*Kempen 513385*

113. Walikota Surabaya Doel Arnowo (kedua dari kiri)  
mengunjungi Pameran pada Pekan Raya ke-28, Surabaya,  
25 September 1951.

*Jawatan Penerangan Jatim B – 3*

114. Stand exposisi Djawatan Penerangan Provinsi Jawa Timur  
pada Pekan Raya ke-28.

*Jawatan Penerangan Jatim 4*

115. Pembuatan gula mangkuk/gula merah di Kecamatan Prwosari

*Djapen Kabupaten Kediri*

116. Pembukaan selubung batu peringatan oleh Presiden  
Soekarno pada upacara pembukaan Pabrik Tekstil Ratatex,  
Mojokerto, 15 Mei 1958.

*Kempen 580515 HS 6*

117. Wakil Presiden Mohammad Hatta melihat-lihat hasil Ratatex  
pada upacara pembukaan, 15 Mei 1958

*Kempen 580515 HS 13*

118. Pabrik Tekstil Ratatex (Rachman Tamin & Co) di Krian Mojokerto, keluarga besar Rachman Tamin yang mengurus pabrik, 15 Mei 1958.

*Kempen 580515 HS 15*

119. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Ringan No.18/M/Perdas/66 tanggal 13 Mei 1966 tentang penunjukan anggota direksi PN. Semen Gresik, dengan lampiran.

*Ekubang/694*

*3 lembar*

120. Tempat pembikinan serbuk Lindaan (dusting powder), Pabrik Soda Negeri di Waru Jawa Timur, 21 Mei 1958

*Kempen 580521 HS 26*

121. Surat dari Sekretaris Wakil Presiden Ekubang Selo Soemardjan kepada Menteri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tanggal 17 Juni 1966 tentang permohonan penjelasan dari CV. Bintang Djaja mengenai usaha pertambangan bijih manga'an di Kecamatan Puger dan Wuluhan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

*Ekubang/746*

*2 lembar*

## PERDAGANGAN

122. Berigt over Clajpus Oijl per De pandjallang de petronella van Greisse, Tammerinde per Het Schip Vlessingen van Soerabaija aangebragt en noopends de uijt geleerverde lading van Het Schip Vlissingen Jongst van Soerabaija.

Berita dari Kapal Petronella dan Gresik dan Kapal Vlessingen dari Surabaya mengenai pengiriman minyak calipus dan asam. 31 Oktober – 1 November 1775

Hoge Regering No. 1603

6 lembar

123. Suasana lelang barang di pegadaian Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur

*KIT 0316/036*

124. Kegiatan jual beli di pasar, Jawa Timur 1900

*KIT 0233/006*

125. Daerah pusat perdagangan di Surabaya, Jawa Timur, 1920

*KIT 0087/074*

## SOSIAL

126. Berkas laporan perhitungan biaya perawatan dan pemakaman pegawai dan laporan proses verbal pelanggaran penjualan barang-barang milik sanatorium di daerah Dangoes Madiun dan Plalangan Jember. 1941 – 1942

*Binnenlands Bestuur No. 214*

*5 lembar*

127. Kompleks makam kuno Malik Ibrahim Gresik Jawa Timur  
*KIT 0819/081a*

128. Upacara pemakaman jenazah ibunda Presiden Soekarno, di  
Blitar Jawa Timur, 13 September 1958

*Kempen 580 913 HK 7, 580 913 HK 27,  
580 913 HK 38, 580 913 HK 43*

## **LINGKUNGAN HIDUP**

129. Asap keluar dari kawah Gunung Bromo dekat padang pasir  
Jawa Timur, 1920

*KIT 0088/044*

130. Presiden Soekarno dengan rombongan mengunjungi Gunung  
Kelud yang baru meletus, Agustus 1951.

*Kempen 510922 HK 13, 16*

131. Bencana banjir di Kabupaten Madiun yang menghancurkan  
gedung pemerintahan dan memutuskan jalur transportasi,  
30 – 31 Desember 1958.

*Kempen Mdn 1/59, Mdn 4/59, Mdn 12/59*

132. Bencana banjir di Kediri yang memutuskan jalur transportasi,  
30/31 Desember 1958, Desa Djontok, Purwosari (Kabupaten  
Kediri), dilanda banjir setinggi 2m.

*Djapenpro Jawa Timur 3/kd/59*

133. Bencana banjir di Kediri yang memutuskan jalur transportasi, 30/31 Desember 1958, Desa Djontok, Purwosari (KabupatenTangkis) ; Dam "Sudo" putus dilanda banjir sehingga air Roh Ronto menggenangi daerah Purwosari (Kabupaten Kediri).

*Djapenpro Jawa Timur 4/kd/59*

134. Bencana banjir di Kabupaten Djombang, 30 – 31 Desember 1958 ; Hubungan lalu lintas antara Djombang Kertosono putus.

*Djapenpro Jawa Timur 4/dbg/59*

135. Bencana banjir di Kabupaten Djombang, 30 – 31 Desember 1958 : Evakuasi penduduk dari daerah yang tergenang air oleh Pemerintah Daerah dan Militer setempat.

*Djapenpro 6/dbg/59*

136. Surat dari Menteri Dalam Negeri Mayjen TNI Basoeki Rachmat kepada Wakil Perdana Menteri Ekonomi Keuangan Pembangunan tanggal 4 Mei 1966 tentang laporan dari Gubernur Jawa Timur mengenai kejadian bencana alam dan kerugian serta korban akibat meletusnya Gunung Kelud, dengan lampiran.

*Ekubang/573*

*11 lembar*

## **PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

137. Catatan/Laporan mengenai pertanian di Jawa (padi, kacang, kapas dan kopi), bahasa Belanda. April 1831

*Cultuures 44*

*40 lembar dari 1 band*

138. Berkas rencana penanaman tebu di Pabrik Minggiran, Karesidenan Kediri, disertai peta wilayah Kediri, bahasa Belanda. 26 Januari 1869

*Cultuure 529*

*10 lembar dari 1 band*

139. Perkebunan karet dan kopi di Malang Jawa Timur

*KIT 0642/033*

140. Areal penanaman dan pemeliharaan kopi robusta, Tanahrejo Panjang, Jawa Timur

*KIT 0610/080*

141. Perkebunan rosella yang kayunya dapat digunakan sebagai bahan bakar

*Kempen 580308 HM 1, 7, 19*

## **PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

142. Kopie rapport van Ingenieur j. Schmaltz in opdracht van Gouverneur J. Van Reede tot de Parkeler betreffende de militaire situatie te Soerabaija, Pasoeroean en Banjoewangi, 28 Augustus 1801. Met bijlage kaaren van De Haan No. B. 95, B. 99, B 100 en B 101.

Salinan dari laporan J. Schmaltz berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Gubernur J. Van Reede tot de Parkeler mengenai situasi keamanan di daerah Surabaya, Pasuruan dan Banyuwangi, tanggal 28 Agustus 1801. Disertai lampiran peta dari De Haan No. B. 95, B. 99, B 100 dan B 101.

*Hoge Regering 3963*

*14 lembar dari 1 banden*

143. Topografische militaire kaart van de oevers van de Rivier Soerabaija. 1801

Peta topografis militer mengenai batas pinggir sungai Surabaya. 1801.

*Peta de Haan No. B 95*

144. Plattegrond van de verbeteringen aan het Fort te Passourouang. 1801.

Denah perbaikan benteng pertahanan di Pasuruan. 1801.

*Peta de Haan No. B 99*

145. Plattegrond van de verbeteringen aan het Fort te Banjoewangi. 1801.

Denah perbaikan benteng pertahanan di Banyuwangi. 1801.

*Peta de Haan No. B 100*

146. Plankaart van de veranderingen aan de mondig van de Kalij Bader in de Rivier van Soerabaija. 1801.

Peta rencana perubahan pada muara sungai Kali Bader di Sungai Surabaya. 1801

*Peta de Haan No. B 101*

147. Upacara penyerahan kapal pemburu torpedo "TJERK HIDDDES" oleh Marine Belanda kepada Angkatan Laut Republik Indonesia, Major Martadinata, 1 Maret 1951

*Djawatan Penerangan Jatim No. F13064, 511345*

148. Suasana Pelabuhan di Perusahaan Angkutan Laut Surabaya, Juli 1951.

*Kempen 514588*

## PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Jawa Timur Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.